

**EKSISTENSI ELIT POLITIK TERHADAP PILKADA KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2018 (TELAAH KETATANEGARAAN ISLAM)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh:  
**WAWAN ROESANDY**  
**NIM. 10300113130**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Roesandy  
Nim : 10300113130  
Tempt /Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 19 Agustus 1993  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Syekh Yusuf No. 9a  
Judul : Eksistensi ELIT POLITIK TERHADAP PILKADA KOTA  
MAKASSAR TAHUN 2018 (TELAAH KETATANEGARAAN  
ISLAM)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Maret 2018  
Penulis

**Wawan Roesandy**  
Nim. 10300113130

# PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Eksistensi Elit Politik Terhadap Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 (Telaah Ketatanegaraan Islam)”, yang disusun oleh Wawan Roesandy, NIM: 10300113130, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 M, bertepatan dengan 29 Sya’ban 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 15 Mei 2018 M.

29 Sya’ban 1439 H.

## DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si.

Munaqisy I : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Munaqisy II : Dr. Kurniati, M.H.I.

Pembimbing I : Prof. Dr. Usman, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Alimuddin, M.Ag.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

  
**Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag**  
Nip. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan puji dan rasa syukur kepada ilahi Rabbi Allah swt. berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul **Eksistensi Elit Politik Terhadap Pilkada Kota Makassar 2018 (Telaah Ketatanegaraan Islam)**. Kemudian, shalawat serta salam-Nya, mudah-mudahan terlimpah curah kepangkuan baginda Rasulullah saw. beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang masih turut dengan ajarannya. Amin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil. Dan juga kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan hanya terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus selaku Penguji I yang telah memberikan ijin penelitian dan selalu sabar memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si. selaku ketua program studi jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
4. Ibu Dr. Kurniati, M.H.I. selaku Penasehat Akademik dan Penguji II yang selalu sabar memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.



5. Bapak Prof. Dr. H. Usman, MA. selaku pembimbing 1 yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag. selaku pembimbing 2 yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besar KKN Ang. 56 Desa Tonasa yang telah menyumbang tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa program studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan terbatas ini.

Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, keluarga besarku, dan juga kepada kampusku Universitas Negeri Alauddin Makassar, semoga dapat bermanfaat.

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin

Makassar, 24 Maret 2018

**Penyusun**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1-9
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II PEMBAHASAN .....	10-42
A. Peran Elit Politik .....	10
B. Pemilukada Sebagai Sarana Politik .....	15
C. Partai Politik Sebagai Sarana Demokrasi .....	25
D. Konsep Islam Terhadap Politik di Pilkada .....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	53-60
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Sumber Data .....	55
D. Metode Pengumpulan Data .....	57
E. Instrument Penelitian .....	58
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	59
G. Pengujian Keabsahan Data .....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	61-78
A. Setting Lokasi Penelitian .....	61
B. Kondisi Sosial Politik Kota Makassar .....	64
C. Peran Elit Politik Terhadap Pilkada di Kota Makassar (Telaah Ketatanegaraan Islam) .....	65
D. Persepsi Elit Politik Terhadap Pilkada Kota Makassar .....	73
E. Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Elit Politik di Pilkada Kota Makassar .....	75
BAB V PENUTUP.....	79-80
A. Kesimpulan .....	80
B. Implikasi Penelitian .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82-87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik



غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *haula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِ.. اِ..	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّقَ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu"ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَدُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله dīnullāh دِينَ الله

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*  
*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*  
*Abū Naṣr al-Farābī*  
*Al-Gazālī*  
*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



swt.	=	<i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



## ABSTRAK

**Nama : Wawan Roesandy**

**NIM : 103 001 131 30**

**Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana dan Ketatanegaraan**

**Judul : Eksistensi Elit Politik Terhadap Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 (Telaah Ketatanegaraan Islam)**

---

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Eksistensi Elit Politik Terhadap Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 (Telaah) Ketatanegaraan Islam. Adapun sub masalahnya, yaitu: (1) peran elit politik terhadap pilkada Kota Makassar telaah ketatanegaraan Islam; (2) persepsi elit politik terhadap proses pilkada di Kota Makassar; (3) persepsi masyarakat terhadap peran elit politik di pilkada Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan (*literature research*), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan, yang menghasilkan data primer dan data sekunder yang diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan penomenologi dan pendekatan syar'i. Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Peran elit politik terhadap pilkada di Kota Makassar dan dalam Ketatanegaraan Islam mempunyai perbedaan dan kesamaan. Perbedaannya adalah dalam pilkada di Kota Makassar elit politik mempunyai peran sebagai pemberi informasi mengenai calon pemimpin kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan kampanye. Tahapan ini tidak terdapat dalam ketatanegaraan Islam. Sedangkan persamaannya adalah elit politik melakukan musyawarah untuk menentukan kriteria calon pemimpin dan melakukan koalisi untuk calon yang telah ditetapkan sebagai calon pemimpin. Tahapan ini juga terdapat dalam ketatanegaraan Islam pada masa pemerintahan Rasulullah Saw. dan Khulafaur Rasyidin. Perbedaan lainnya juga ialah pada ketatanegaraan Islam masyarakat melakukan bai'at (janji setia) dihadapan pemimpinnya untuk dipimpin oleh pemimpin yang terpilih. Sedangkan hal tersebut tidak terdapat pada pilkada di kota Makassar, (2) Pilkada di kota Makassar menunjukan bahwa hubungan demokrasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat telah berjalan sebagaimana mestinya. Karena pemerintah, partai politik dan masyarakat telah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan tatanan negara demokrasi, (3) Masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda – beda terhadap peran elit politik di pilwakot Makassar. Ada yang beranggapan elit politik belum melakukan kampanye hitam dan ada juga yang beranggapan elit politik telah melakukan kampanye hitam.

Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Sebaiknya elit politik lebih memperhatikan kesisi agamanya dalam menentukan calon yang didukungnya. Sehingga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang berlandaskan dengan

syariat Islam, (2) Proses pelaksanaan pilkada harus diperhatikan terus - menerus dan ditingkatkan lagi, sehingga proses pelaksanaan pilkada akan terus berjalan secara demokrasi. (3) Elit politik sebaiknya lebih hati-hati dalam menjalankan perannya sehingga masyarakat tidak salah paham mengenai tindakan yang dilakukan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Elit merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tidak hanya dalam aktivitas politik namun juga dalam aktivitas sosial. Elit ialah kelompok orang yang mempunyai indeks kemampuan yang tinggi dalam aktivitas mereka, apapun bentuknya akan tetapi dia kemudian mengkonsentrasikan diri pada apa yang disebut sebagai elit penguasa yang dipertentangkan dengan massa yang tidak berkuasa.<sup>1</sup>

Konsep umum elit yang dapat dilihat dimasyarakat ialah adanya kelas manusia yang menguasai dan dikuasai. Elit merupakan orang-orang yang mampu menduduki jabatan yang tinggi dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui kaum elit di manapun berada pasti mempunyai suatu power (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan.<sup>2</sup>

Peranan kaum elit di negara berkembang seperti Indonesia ialah, sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup> Isu kepemimpinan nasional menjadi penting guna mengukur posisi elit partai yang akan maju atau elit di luar partai politik yang dijagokan oleh partai. Walau demikian, elit di luar partai juga termasuk elit dalam tingkatan kelas sosial dalam strata masyarakat. Elit dalam pengaruhnya dapat

---

<sup>1</sup>Agus Setiyanto, *Elite Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2001), h. 75.

<sup>2</sup>A.P. Sumarno, *Dimensi - Dimensi Komunikasi Politik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 147.

<sup>3</sup>Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 307.

memotori suatu partai ataupun perilaku masyarakat untuk menetapkan pilihannya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam suatu pemilihan umum.<sup>4</sup>

Politik lokal di Indonesia mengenai pemusatan atau pergerakan massa yang dilakukan oleh pemusatan kekuatan oleh elit-elit politik yang mempunyai kepentingan terhadap daerah tersebut. Dalam kasus ini elit mencoba untuk memberikan strategi yang sangat menguntungkan dari otonomi daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur tidak percaya pada negara, bagi mereka yang terbukti gagal dalam banyak hal.<sup>5</sup>

Perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia merupakan suatu hal yang selalu menjadi perhatian dalam proses perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Sistem demokrasi yang sudah mewabah hampir di seluruh belahan muka bumi menunjukkan bahwa sistem demokrasi menjadi harapan bagi sebagian besar masyarakat yang ada di muka bumi untuk memperoleh kehidupan politik yang baik. Demokrasi yang terjadi di hampir seluruh belahan bumi tersebut juga terjadi di Negara Indonesia dengan runtuhnya rezim orde baru yang represif dan otoriter, pasca rezim orde baru runtuh ini, perkembangan sistem demokrasi di Indonesia menjadi suatu hal yang menandakan peningkatan akses masyarakat ke dalam dunia politik yang akan terus berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup>

Didasari semangat itulah, maka pada tanggal 29 September 2004 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah final merevisi UU No. 22 Tahun 1999 dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan,

---

<sup>4</sup>A.P. Sumarno, *Dimensi - Dimensi Komunikasi Politik*, h. 147.

<sup>5</sup>Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, h. 309.

<sup>6</sup>A.P. Sumarno, *Dimensi - Dimensi Komunikasi Politik*, h. 150.

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 Tahun 2005 : ”Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.”<sup>7</sup>

Pada Pilwakot Makassar 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menetapkan tahapan pilwakot dimulai dari tahapan perencanaan program dan anggaran pilwakot, tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS, tahapan pemutahiran data dan daftar pemilih, tahapan pendaftaran calon sampai dengan tahapan pemungutan dan perhitungan suara.<sup>8</sup>

Pada Pilwakot Makassar 2018 terdapat 2 pasang calon kandidat pasangan yang pertama adalah Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAMI) melalui jalur perseorangan. Sedangkan pasangan yang kedua adalah Paslon Munafri Arifuddin dan Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) melalui jalur partai politik dengan memborong 10 parpol dukungan.<sup>9</sup> Adapun keseluruhan Parpol yang mendukung Appi-Cicu yakni Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, PKPI, PDIP, Gerindra, PKS, dan PPP.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Tim Viva Justicia, *Undang-Undang Pilkada* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016) h. 249.

<sup>8</sup><https://berita-sulse1.com/2017/11/15/catat-ini-tahapan-pilwali-makassar-2018/> (Pukul 04:18 Wita), Diakses pada 8 Februari 2018 pukul 15:39 WITA.

<sup>9</sup><https://news.detik.com/berita/d-3809944/pilwalkot-makassar-duel-independen-vs-parpol>, Diakses pada 8 Februari 2018 pukul 15:50 WITA.

<sup>10</sup><http://makassar.tribunnews.com/2018/01/09/jelang-pendaftaran-appi-cicu-genggam-10-partai-pengusung>, Diakses pada 8 Februari 2018 16:10 WITA.



Garis besar perkembangan elit politik di Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan. Elit modern ini jauh lebih beraneka ragam daripada elit tradisional.<sup>11</sup> Suzane Keller mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik kedalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elit itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik. Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang bereksistensi berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan.<sup>12</sup> Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut Pilkada dalam penyelenggaraannya di Indonesia merupakan sebuah polemik di masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan serta Pilkada secara langsung sesudah era reformasi.<sup>13</sup>

Menurut sejarah Islam ada beberapa metode untuk memilih pemimpin. Diantaranya adalah pada saat pemilihan khalifah sepeninggalnya Nabi Muhammad. Pertama, proses pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajirin dan kelompok Anshar. Akan tetapi hasil musyawarah bersama menyepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi pemimpin umat Islam pada zaman tersebut. Kemudian terpilihnya Umar Ibn Khathab sebagai amirul mukminin setelah Abu Bakar melalui mandat yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umar Ibn Khathab. Sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn

---

<sup>11</sup>Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984) h. 180.

<sup>12</sup>Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 173.

<sup>13</sup>Hendra Budiman, *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 21.

Khathab melalui musyawarah ahlu al-halli wa al-aq di (dewan pemilih) yang ditunjuk oleh Umar. Sementara Ali Ibn Abi Thallib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyyah. Adapun kekhalifahan Muawiyyah diperoleh melalui kekerasan, tipu daya dan pemberontakan. Kemudian ketika Muawiyyah akan turun tahta, ia mengumumkan penggantinya kepada putaranya (Yazid).<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Eksistensi Elit Politik Terhadap Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 (Telaah Ketatanegaraan Islam)”**.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan, maka penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan tentang Eksistensi Elit Politik Terhadap Pilkada (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam) sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian :
  - a. Peran Elit Politik
  - b. Pilkada Kota Makassar
  - c. Ketatanegaraan Islam
2. Deskripsi Fokus
  - a. Peran Elit Politik adalah peranan atau perilaku sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik. Peranan kaum elit di negara berkembang seperti Indonesia ialah, sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi,

---

<sup>14</sup>Imron Rosyidi, *Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 15.

sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Pilkada Kota Makassar adalah pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung di daerah kota Makassar yaitu Pemilihan Umum Walikota Makassar.
- c. Ketatanegaraan Islam adalah aturan yang mengatur tentang organisasi Negara islam yang berasaskan Alquran dan hadits sebagai landasan dalam menjalankan organisasi Negara.

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1. Peran Elit Politik	peranan atau perilaku sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik
2. Pilkada Kota Makassar	peran elit politik terhadap pemilihan umum walikota makassar
3. Ketatanegaraan Islam	aturan yang mengatur tentang organisasi Negara islam yang berasaskan Alquran dan hadits sebagai landasan dalam menjalankan organisasi Negara

### C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Eksistensi Elit Politik Terhadap Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 (Telaah Ketatanegaraan Islam)? dan sub masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran elit politik terhadap pilkada Kota Makassar (Telaah Ketatanegaraan Islam)?
2. Bagaimana persepsi elit politik terhadap proses pilkada di Kota Makassar?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran elit politik di pilkada Kota Makassar?

#### **D. Kajian Pustaka**

Menilai apakah suatu penelitian layak atau tidak untuk diteliti, diperlukan sebuah kajian pustaka seperti berikut :

1. **Moh. Kosnardi dan Harmaily Ibrahim**, dalam bukunya “**Hukum Tata Negara Indonesia**”, dalam buku ini menjelaskan tentang pemilihan umum adalah salah satu cara menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistim pemilihan umum. Sistim pemilihan umum berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut mana pandangan ditujukan terhadap rakyat. Buku ini tidak menjelaskan peranan elit politik dalam sistim pemilihan umum. Buku ini hanya menjelaskan mengenai pemilihan umum.

2. **Jimly Asshiddiqie**, dalam bukunya “**Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**”, dalam buku ini menjelaskan tentang partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutment politik (*political recruitment*). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader elit pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu dalam sarana politik. Buku ini hanya menjelaskan mengenai elit politik yang ada di partai politik. Buku ini tidak banyak membahas mengenai siapa saja yang termasuk kamu elit politik.

3. **Titik Triwulan Tutik**, dalam bukunya “**Pokok-Pokok Hukum Tata Negara**” dalam buku ini menjelaskan tentang pemilu memang dianggap sebagai

lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya pelaksanaan pemilu hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cermin pendapat warga negara. Buku hanya menjelaskan mengenai keterlibatan penuh masyarakat terhadap pemilu. Buku ini tidak menjelaskan peranan elit politik terhadap pelaksanaan pemilu.

4. **S.P.Varma**, dalam bukunya **“Teori Politik Modern”** dalam buku ini menjelaskan mengenai teori elit merupakan orang-orang yang mampu menduduki jabatan yang tinggi dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui kaum elit di manapun berada pasti mempunyai suatu power (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Buku ini hanya menjelaskan mengenai pengertian kaum elit di masyarakat. Buku ini tidak menjelaskan peran elit politik dalam pilkada.

5. **Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken**, dalam bukunya **“Politik Lokal di Indonesia”** dalam buku ini menjelaskan mengenai elit politik adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik. Peranan kaum elit di negara berkembang seperti Indonesia ialah, sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Buku ini hanya menjelaskan secara umum mengenai peran elit politik dalam sistim perpolitikan di negara. Buku ini belum menjelaskan secara spesifik peran elit politik terhadap pemilu walikota.

Dari beberapa hasil penelitian yang dijelaskan di atas baik secara perorangan ataupun kelompok belum ada yang membahas mengenai peran elit politik terhadap pilkada. Meskipun hasil dari penelitian di atas telah membahas mengenai elit politik

dan pilkada. Tetapi, hasil penelitian tersebut belum membahas lebih dalam mengenai masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu, masalah yang akan diteliti ini dianggap penting dan layak untuk diteliti lebih dalam.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui peran kaum elit politik terhadap pilkada.
- b. Untuk mengetahui peran elit politik terhadap pemilihan umum Walikota Makassar.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai peran elit politik.

##### **2. Kegunaan**

- a. Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan politik pada umumnya dan khususnya politik di Kota Makassar.
- b. Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya.
- c. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan memberikan gambaran mengenai peran elit politik terhadap pemilihan umum Walikota Makassar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. *Peran Elit Politik***

##### **1. Teori Peran**

Peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), serta perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>1</sup>

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu :

- a. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- e. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 846.

- f. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.<sup>2</sup>

Namun jika ingin mempelajari teori tentang peran, ada beberapa literatur yang dapat dilihat dari pandangan sosiologi hukum bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>3</sup> Peranan mencakup tiga hal sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan, dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>4</sup>

Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang

---

<sup>2</sup>Bruce J. Cohen, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 25.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara. 2002), h. 243.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2009), h. 213.

dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena jika melihat pengertian tersebut keduanya saling berhubungan.<sup>5</sup>

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.<sup>6</sup>

Peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Teori peran yang demikian memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Pada dasarnya, pandangan kita terhadap peran adalah bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu yang berdasarkan pada sebuah interpretasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu. Namun ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran (role conflict). Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1995), h. 751.

<sup>6</sup>Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), h. 67.

<sup>7</sup>Y. Ambeg Paranarta, dkk, *Peran Elit Politik Dan Partai Politik Dalam Mencegah Konflik Di Pilkada*, h. 29.

## 2. Teori Elit Politik

Elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Demokrasi elit politik di setiap masyarakat adalah suatu minoritas yang mampu membuat keputusan - keputusan besar.<sup>8</sup>

Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Masyarakat terdiri dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non governing elite) . Kedua, lapisan rendah (non- elite).<sup>9</sup>

Dalam semua masyarakat mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah biasanya jumlahnya lebih sedikit memegang semua fungsi politik monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungankeuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Robert Van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), h. 34.

<sup>9</sup>Agus Setiyanto, *Elite Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2001), h. 75.

<sup>10</sup>A.P. Sumarno, *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 147.

Pengertian Elit Politik adalah sekelompok kecil orang berkualitas yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat yang diperlukan pada kekuasaan sosial politik untuk memerintah.<sup>11</sup>

Elit politik merupakan individu-individu yang memiliki keistimewaan dalam pemahaman, pemaparan, dan pengalaman mengenai sistem kekuasaan selain itu, elit politik juga merupakan individu yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai suatu minoritas yang memiliki status sosial dalam peran dan fungsinya di tengah masyarakat. Sehingga dengan kedudukan yang istimewa inilah kemudian elit menjadi faktor penentu yang berperan dalam mendorong dan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.<sup>12</sup>

Partisipasi politik elit politik masyarakat di Indonesia berdasarkan intensitasnya terbagi dalam tiga bentuk yakni sebagai pengamat, partisipan, dan aktivis. Masyarakat sebagai pengamat ditunjukkan dalam bentuk pemberian suara. Sedangkan elit politik masyarakat sebagai partisipan ditunjukkan dalam bentuk menjadi peserta kampanye, juru kampanye, saksi dalam pemilu, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dan terlibat dalam diskusi-diskusi informal. Dan elit politik masyarakat sebagai aktivis yaitu menjadi panitia penyelenggara pemilu dan menjadi pengurus partai politik. Adapun seberapa besar seseorang (aktor) berpengaruh pada pembuatan kebijakan dipengaruhi beberapa faktor di antaranya: minat pada politik, pengetahuan dan pengalaman politik, kecakapan dan sumber daya politik, partisipasi politik, kedudukan politik serta kekuasaan politik.<sup>13</sup>

Motif partisipasi politik elit politik masyarakat dalam pemilu legislatif adalah motif rasional bernilai dan keikutsertaan mereka dengan berpartisipasi politik

---

<sup>11</sup>Robert Van Niel. *Munculnya Elite Modern Indonesia*, h. 36.

<sup>12</sup>S. P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 203.

<sup>13</sup>S. P. Varma, *Teori Politik Modern*, h. 204.

atas dasar pertimbangan rasional. Sebagian elit politik perempuan telah menilai secara objektif pilihannya dan sebagian lainnya mengandung motif yang afektual emosional yaitu akibat penilaian terhadap agama serta partai politik yang dipilih merupakan suatu bentuk kristalisasi nilai yang didapatkan dalam lingkungan politiknya.<sup>14</sup>

### **B. *Pemilukada Sebagai Sarana Politik***

Pemilukada menentukan siapa yang akan memegang kedali pemerintahan. Dari sudut pandang penelitian, pemilukada juga memiliki keuntungan berupa pelibatan sejumlah besar warga dan diperolehnya statistik terpercaya dalam volume yang besar. Dengan begitu pemilukada merupakan salah satu topik terbaik untuk penelitian mengenai perilaku politik massa. Perhelatan ini menjelaskan banyak hal tentang hubungan warga masyarakat dengan politik, apa yang menurut mereka penting, dan bagaimana mereka menentukan sikap terhadap pemerintahan dan persoalan tertentu.<sup>15</sup>

Prasyarat untuk pemilukada demokrasi tidaklah mudah, dan kita janganlah menyepelekan syarat ini, sekalipun di negara-negara demokrasi yang maju. Syarat-syarat itu meliputi hak pilih universal untuk orang dewasa, bilik suara yang tertutup, pengelenggaraan pemilukada dan perhitungan suara yang netral, bebas untuk mendatangi TPS, kebebasan dari para kandidat dan partai untuk mengikuti pemilukada dan tidak adanya pemihakan kepada partai atau golongan tertentu. Pemilukada yang bebas juga mensyaratkan adanya hak dasar berdemokrasi, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat, akses terhadap pelaporan berita yang

---

<sup>14</sup>S. P. Varma, *Teori Politik Modern*, h. 205.

<sup>15</sup>Kenneth Newton and Jan W. van Deth, *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta* (Cet. I; Bandung : Nusa Media, 2016), h. 309.



akurat dan adil dan partai-partai yang tidak berbeda secara mencolok dalam hal sumberdayanya. Relatif sedikit negara yang memenuhi semua persyaratan ini. Bahkan, pemilu pada presiden Amerika pada tahun 2000 menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran pemilu dan penghitungan suara masih jauh dari sempurna di negara itu.<sup>16</sup>

### 1. Konsep Dasar Pemilu

Hampir tidak ada pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.<sup>17</sup>

Dilihat dari segi hukum, kedaulatan hakekatnya merupakan kekuasaan yang tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Kekuasaan tersebut meliputi: *Pertama*, kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan serta melaksanakan hukum terhadap semua orang dan golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya atau kedaulatan dalam (*internal sovereignty*); *Kedua*, kekuasaan tertinggi yang tidak

---

<sup>16</sup>Kenneth Newton and Jan W. van Deth, *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta*, h. 310.

<sup>17</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara* (Cet. I; Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2006), h. 247.

diturunkan dari kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain (intervensi negara lain) atau kedaulatan keluar (*external sovereignty*).<sup>18</sup>

Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.<sup>19</sup>

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu pada waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.<sup>20</sup>

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai azas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>21</sup>

Kenyataannya, apapun alasannya hanya pemerintahan representatiflah yang dianggap memiliki legitimasi dari rakyat untuk memimpin dan mengatur pemerintahan (menjadi pengelola kekuasaan). Sehingga dengan melalui

---

<sup>18</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, h. 248.

<sup>19</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, h. 248.

<sup>20</sup>M. Rusli Karim, *Pemilu dalam Demokrasi Kompetitif* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 2.

<sup>21</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Sinar Bakti, 1983), h. 329.

pemilukada, klaim jajaran elit pemerintahan bekerja untuk dan atas nama kepentingan rakyat menjadi dapat diakui.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan Pemilukada

Pada hakekatnya pemilukada, dinegara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilukada, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.<sup>23</sup>

Ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilukada, yaitu: Tujuan *Pertama*, Pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (*otoritas*) dan mencapai tindak keterwakilan politik (*political representativeness*). Tujuan *Kedua* manfaat (tujuan) tersebut merupakan tujuan langsung yang berada dalam skala waktu relatif pendek. Hal ini mengisyaratkan manfaatnya dirasakan segera setelah proses pemilukada berlangsung. Tujuan *Ketiga*, tujuan tidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktifitas dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilukada, baik kontestan, maupun para pelaksana dan pengawas dalam kurun waktu relatif lama, yaitu pembudayaan politik dan pelembagaan politik. Dalam arti lebih sederhana tujuan langsung berkaitan dengan hasil pemilukada, sedangkan tujuan tidak langsung berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut.<sup>24</sup>

Pemilukada pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni: 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; 2) pembentukan perwakilan politik rakyat; 3) sirkulasi elit penguasa; dan 4) pendidikan politik.<sup>25</sup> Sebagai sarana

<sup>22</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, h. 249.

<sup>23</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, h. 249.

<sup>24</sup>Parulian Donald, *Menggugat Pemilukada* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011) h. 8.

<sup>25</sup>Ardi Sanit, *Partai, Pemilukada, dan Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 158.

pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemiluukada bertujuan antara lain:<sup>26</sup>

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- c. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara.

Pergantian pemerintahan di negara-negara totaliter berbeda dengan negara-negara demokrasi. Negara-negara totaliter ditentukan oleh sekelompok orang, sedangkan di negara-negara demokrasi ditentukan oleh rakyat melalui pemiluukada. Karena itu pemiluukada bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan tetapi tidak berarti setiap diadakan pemiluukada harus ada pergantian pemerintahan disebabkan mungkin saja terjadi suatu partai politik dalam sistem parlementer, pemerintahan untuk dua, tiga atau empat kali, atau seorang presiden di AS untuk dua kali masa jabatan. Selain itu adanya MPR yang disusun anggotanya sesuai kehendak UUD 1945.<sup>27</sup>

Memang harus diakui bahwa tujuan pemiluukada secara signifikansi berbeda menurut sistem politik yang ada, begitu juga fungsinya. Bagi sistem poliyik liberal pemiluukada memiliki empat tujuan pokok. *Pertama*, membentuk basis konsep demokrasi liberal. Tapi pemiluukada, tanpa persaingan terbuka diantara kekuatan sosial dan kelompok politik dalam menuju kekuasaan politik maka tidak ada demokrasi. *Kedua*, pemiluukada melegitimasi sistem politik. *Ketiga*, mengabsahkan kepemimpinan politik. *Keempat*, pemiluukada sebagai unsur pokok partisipasi politik di negara-negara demokrasi barat.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 330.

<sup>27</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, h. 251.

<sup>28</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, h. 251.

Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat.<sup>29</sup> Maksudnya adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu pada dalam waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:

- a. Memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai;
- b. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya.<sup>30</sup>

Ditinjau dari sudut kelompok warga negara yang tergabung partai politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena bermanfaat:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukungnya;
- b. Jika menang, sebagai media untuk menjalankan programnya.<sup>31</sup>

Dengan demikian maka pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga negara, partai politik dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu yang jujur berarti pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, tapi sebaliknya jika pemilu dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan rakyat tersebut hanya bersifat semu. Dari sudut pemilu itu sendiri, ketiga tujuan pemilu baru dapat tercapai jika pemilu dilaksanakan secara jujur, sehingga setiap warga negara yang berhak memilih memberikan pilihan sesuai hati nuraninya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat 2.

<sup>30</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 332.

<sup>31</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 332.

<sup>32</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, h. 252.

### 3. Asas dan Sistem Pemilukada

#### a. Asas Pemilukada

Asas pemilihan umum dalam undang-undang yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.<sup>33</sup>

Pemilukada di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilukada meliputi:

1. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
3. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
4. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilukada, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilukada, pengawas dan pemantau pemilukada, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak

---

<sup>33</sup>UU NRI No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu pada setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu pada mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>34</sup>

b. Sistem Pemilu

Sistem pemilu di dunia terbagi ke dalam empat keluarga besar, yaitu:

1. Sistem Distrik

Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya didasarkan atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian *block vote* dan *party block vote*. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil semua suara yang didapatnya. Sistem ini terbagi atas *first past the post*, *alternative vote*, *two round system*, *block vote*.

2. Sistem proporsional

Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Dalam sistem ini dikenal istilah district magnitude. Variasi dari sistem ini adalah *proportional representation* dan *single transferable vote*.

Pada sistem proporsional ada sejumlah mekanisme yang digunakan untuk menentukan perolehan kursi. Secara garis besar teknik penghitungan suara dipilah menjadi dua, yaitu teknik kuota dan divisor.<sup>35</sup>

Teknik kuota atau dikenal juga dengan suara sisa terbesar (*the largest*

<sup>34</sup>UU NRI No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

<sup>35</sup>Arend Lijphart, *Electoral System and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990* (New York: Oxford UP, 1995), h.153.

*remainder*) terdapat beberapa varian di antaranya varian Hare dan Droop. Ciri umum dari teknik kuota adalah adanya bilangan pembagi pemilih yang tidak tetap, tergantung pada jumlah pemilih. Teknik divisor atau dikenal juga dengan perhitungan rata-rata angka tertinggi (*the highest average*) muncul berkaitan dengan kelemahan yang ditemukan pada teknik kuota. Beberapa varian dari teknik divisor adalah D'Hondt, Saint Lague.<sup>36</sup>

### 3. Sistem campuran

Sistem pemilukada campuran merupakan perpaduan penerapan secara bersama-sama sistem distrik dengan sistem proporsional dalam suatu negara. Sistem ini meliputi sistem *parallel* dan *mixed member proportional*.

### 4. Sistem pemilukada di luar ketiga sistem utama

Sistem ini merupakan campuran antara sistem distrik dan proporsional. Varian dari sistem ini adalah *single non-transferable vote*, *limited vote*, dan *borda count*. Sistem pemilukada memiliki dimensi yang sangat kompleks. Beberapa dimensi tersebut antara lain adalah:

1. Penyuaaraan (*balloting*). Penyuaaraan adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Jenis penyuaaraan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kategorikal (pemilih hanya memilih satu partai atau calon) dan ordinal (pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya).
2. Besaran distrik (*district magnitude*). Besaran distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu distrik beranggota tunggal dan

---

<sup>36</sup>Arend Lijphart, *Electoral System and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, h.155.



distrik beranggota jamak. Besaran distrik berpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam memperebutkan kursi. Semakin besar magnitude sebuah distrik maka semakin rendah kompetisi partai untuk memperebutkan kursi. Sebaliknya, semakin kecil magnitude sebuah distrik maka semakin ketat kompetisi partai untuk memperebutkan kursi.

3. Pembuatan batas-batas representasi (pendistrikan). Cara penentuan distrik merupakan hal yang krusial di dalam pemilu. Ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan batas-batas pendistrikan, yaitu masalah keterwakilan dan kesetaraan kekuatan suara.
4. Formula pemilihan (*electoral formula*). Formula pemilihan adalah membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Secara umum formula pemilihan dibedakan menjadi tiga, yaitu formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang.
5. Ambang batas (*threshold*). *Threshold* yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas minimal itu biasanya diwujudkan dalam prosentase dari hasil pemilu.
6. Jumlah kursi legislatif. Berapakah jumlah kursi legislatif yang ideal adalah sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Belum diketahui mengapa suatu negara menetapkan jumlah kursi di parlemen beserta alasannya.<sup>37</sup>

Keenam unsur tersebut di atas yang membentuk sistem pemilu. Bagaimana sistem pemilu akan digunakan serta untuk tujuan atau kepentingan apa sistem pemilu harus didasarkan pada keenam unsur tersebut. Dengan demikian, unsur tersebut merupakan bagian penting dalam upaya rekayasa sistem

---

<sup>37</sup>Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), h. 14.

pemilukada dalam mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.<sup>38</sup>

### **C. *Partai Politik Sebagai Usaha Demokrasi***

Berbicara mengenai elit politik, tidak terlepas dari pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan alat atau “kendaraan” dari para elit untuk berkuasa dan berkontestasi dalam pilkada. Kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen yang dikelola tetapi juga kepada bangsa dan negara. Selain itu organisasi partai politik dapat menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan politik.<sup>39</sup>

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yakni polis yang berarti kota yang berdaulat, seperti Athena, Sparta, dan Korinthus sebagai lawan daerah yang takluk dan wajib membayar pajak kepadanya. Pengertian ini berdasarkan pemikiran filsafat mengenai negara yang terjalin dengan definisi-definisi yang berasal dari zaman Plato dan Aristoteles. Bagi Plato dan Aristoteles, organisasi politik dari warga negara Yunani Purba yang disebut polis adalah organisasi yang bertujuan memberikan kepada warga negaranya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini merupakan rasion d’etre dari polis tersebut. Jadi polis bertujuan menjamin kehidupan yang baik bagi warga negara. Karena itu, masalah-masalah yang dihadapi oleh polis menjadi masalah bersama yang juga menjadi tanggung jawab individu untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, polis bersifat totaliter dalam artian tidak dikenal pemisahan antara negara dan masyarakat.<sup>40</sup>

Organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari

---

<sup>38</sup>Sri Yanuarti dan Moch. Nur Hasim, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilukadada, dan Sistem Presidensil* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2013), h. 22.

<sup>39</sup>Ganjar Nugraha Jiwa Praja, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Armico, 1981), h. 2.

<sup>40</sup>Ganjar Nugraha Jiwa Praja, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 2.

dukungan tersebut. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik. Sebagai suatu organisasi yang khas, partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain.<sup>41</sup>

Partai politik merupakan group atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik.<sup>42</sup> Tujuan utama dibentuknya partai politik adalah mendapatkan kekuasaan dan melakukan kontrol terhadap orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, sekaligus kebijakannya. Partai politik sangat terkait dengan kekuasaan untuk membentuk dan mengontrol kebijakan publik. Selain itu, partai politik juga diharapkan independen dari pengaruh pemerintah. Hal ini tentunya menyiratkan tujuan agar partai politik bisa mengkritisi setiap kebijakan dan tidak tergantung pada pemerintah yang dikritisi.<sup>43</sup>

Partai politik adalah organisasi artikulasi dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.<sup>44</sup>

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan

---

<sup>41</sup>Firmanzah, *Mengelola Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 67.

<sup>42</sup>Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, h. 69.

<sup>43</sup>Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, h. 69

<sup>44</sup>Sigmund Neumann, *Modern Political Parties dalam Comparative Politic: A Reader*, (London: The Free Press of Glencoe, 1963), h. 352.

politik dengan cara konstutisional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>45</sup>

Partai politik dapat di definisikan sebagai kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.<sup>46</sup> Partai politik adalah perkumpulan (segolongan orang) yang seases, sehaluan, setuju (terutama di bidang politik). Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka, maupun yang berdasarkan partai massa yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partai politik juga diartikan sebagai perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan suatu politik tertentu.<sup>47</sup>

Partai Politik yaitu Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>48</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli sebelumnya dapat di- simpulkan bahwa secara umum partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan

---

<sup>45</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 404.

<sup>46</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama, 1992), h. 116.

<sup>47</sup>PK. Purwantana, *Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 6.

<sup>48</sup>UU NRI No. 2 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perubahan Atas UU NRI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

stabil oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan dan program-program yang telah mereka susun. Selanjutnya setelah kita memahami arti dari partai politik, maka kita juga perlu memahami fungsi dari partai politik dalam pembentukannya. Untuk memahami fungsi dari partai politik ada beberapa pendapat dari para ahli serta peraturan perundang-undangan yang akan dijelaskan pada pembahasan teori selanjutnya.<sup>49</sup>

Secara Historis, partai politik di Indonesia sebenarnya telah hadir sejak zaman kolonialisme, sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dan membawa Indonesia ke suatu tatanan hukum yang baru. Oleh Miriam Budiardjo, Partai politik lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Salah satu partai politik pada zaman kolonialisme yaitu Budi Utomo namun pergerakannya sangat terbatas. Sedangkan ketika terjadi pergantian kekuasaan antara belanda dengan jepang, maka gerak-gerakan politik maupun partai politik yang telah hadir dahulu dibubarkan. Yang ada hanya organisasi sosial dari golongan muslim yang disebut Masyumi.<sup>50</sup>

Setelah diproklamkan kemerdekaan Indonesia dan pasca dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945, partai politik mulai banyak dibentuk. Sejumlah partai politik yang telah ada sejak era Pergerakan Nasional, tumbuh dengan kemasam yang baru. Partai-partai tersebut telah memiliki massa dan basis pendukungnya sendiri-sendiri. Pada awal kemerdekaan Indonesia, yang dapat

---

<sup>49</sup>Y. Ambeg Paranarta. dkk, *Peran Elit Politik Dan Partai Politik Dalam Mencegah Konflik Di Pilkada*, h. 40.

<sup>50</sup><http://teoripolitik.com/sejarah-partai-politik-di-indonesia/>, Diakses pada 16 Maret 2018 pukul 14:20 WITA.

disebut sebagai partai besar pada waktu itu adalah Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Disamping kedua partai besar ini, terdapat pula partai lain yang memainkan peranan dalam dunia perpolitikan Indonesia saat itu seperti Partindo, Gerindo, Parindra, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh, dan Partai Sosialis yang kemudian pecah menjadi partai sosialis dan Partai Sosialis Indonesia, juga terdapat gerakan lain yang telah hadir sebelum Indonesia merdeka yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.<sup>51</sup>

Peranan partai politik pada masa awal kemerdekaan Indonesia, dalam hal pengambilan keputusan, kebanyakan wakil yang duduk dalam kabinet dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (yang menjadi pembantu presiden sebelum adanya DPR dan MPR) adalah dari partai politik.<sup>52</sup> Keikutsertaan Partai politik dalam pemilu di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1955 dilaksanakan pada era Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu Pertama di Indonesia ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, dilaksanakan 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR). Pelaksanaan pemilihan umum ini kemudian dimenangkan 4 partai besar, yaitu Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 60 Kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, dan PKI 32 kursi. Tahap kedua, dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.<sup>53</sup>

Landasan konstitusional dari pelaksanaan pemilu 1955 yang diikuti oleh partai politik maupun perorangan ini terdapat dalam pasal 57 dan 134 UUDS 1950 yang secara langsung maupun tidak langsung mengisyaratkan untuk dilakukan pemilihan umum untuk anggota DPR maupun Badan Konstituante, sehingga terjadilah suatu refleksi terhadap cita-cita bangsa yang demokratis. Pemilu 1955

---

<sup>51</sup>Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 91.

<sup>52</sup>Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, h. 91.

<sup>53</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, h. 261.

bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari Negara-negara asing.<sup>54</sup> Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Terlaksananya Pemilu 1955 di Indonesia setidaknya merupakan sebagai suatu babak baru dalam proses demokratisasi suatu bangsa yang plural. Dapat dibayangkan pada suatu bangsa baru merdeka selama 10 tahun (bahkan baru mendapatkan pengakuan secara de Jure pada tahun 1949 oleh pemerintah kolonial Belanda) ternyata dapat melangsungkan suatu proses yang menjadi salah satu pilar demokrasi pada Negara modern saat ini.<sup>55</sup>

Keberadaan Partai politik sempat menurun pada saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 yang secara singkat berisi membubarkan dewan konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan membentuk MPRS dan DPAS. Dalam hal pengangkatan MPRS oleh Presiden, walaupun MPRS kedudukannya adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia yang mana setidaknya menempatkan Presiden pada posisi teratas karena MPRS sendiri diangkat oleh Soekarno. Pembubaran Dewan Konstituante menyebabkan ranah perebutan kekuasaan dari partai politik pada waktu itu berkurang, padahal apabila dalam beberapa waktu belum menghasilkan UUD yang baru tentunya dewan konstituante masih akan terus ada yang artinya masih terdapat lingkungan kekuasaan pemerintahan yang diperebutkan, walaupun memang pada dasarnya keberadaan konstituante hanya sementara.<sup>56</sup>

Setelah dikeluarkannya dekrit 5 juli, kemudian pada tanggal 4 juni 1960, DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

---

<sup>54</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, h. 265.

<sup>55</sup>Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, h. 92.

<sup>56</sup>Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, h. 92-93.



(DPR GR). Partai Politik akhirnya kehilangan perannya, baik sebagai sarana artikulasi maupun agregasi aspirasi anggota internal partai maupun masyarakat. Alasan selanjutnya yaitu dengan dibentuknya MPRS yang merupakan hasil pengangkatan secara sepihak oleh Presiden Soekarno waktu itu. Tentunya penunjukkan dan pengangkatan secara sepihak ini tidak lagi mementingkan keberadaan partai politik sebagai suatu sarana rekrutmen politik. Terlebih lagi tercancamnya eksistensi partai politik pada waktu itu ketika sejalan dengan dikeluarkannya dekret 5 juli dan diperkuat keinginan Presiden Soekarno untuk menguburkan partai-partai. Pemilihan umum baru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1971 dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 sebagai tindak lanjut dari Tap No.XLII/MPRS/ 1968 yang menentukan bahwa pemilu dilaksanakan pada 5 juli 1971.<sup>57</sup>

Pemilu tahun 1971 diikuti oleh sebanyak 10 Partai politik. Partai yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 1971 adalah Golkar, NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Katolik, Perti, IPKI, dan Murba. Dalam pemilu kali ini, jumlah suara terbanyak diraih oleh golkar yang mendapatkan 236 kursi dalam parlemen.<sup>58</sup>

Jumlah suara kepada seluruh partai politik peserta pemilu adalah 54.560.509 juta suara dengan jumlah kursi 360. Berlanjut pada periode berikutnya yaitu diadakannya pemilu anggota DPR tahun 1977 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975. Pemilu kali ini, terjadi penyederhanaan partai politik yang akhirnya hanya menyisahkan 3 partai saja yang masing-masingnya merupakan gabungan dari partai sebelumnya berdasarkan platform partai yang mengalami gabungan tersebut. Ketiga partai tersebut adalah Golkar, PPP, dan PDI. Setelah

---

<sup>57</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, h. 272.

<sup>58</sup>Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, h. 94.



pemilu 1977 maka berlanjut kepada pemilu tahun 1982. Pijakan Hukum Pemilu ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Pemilu ini tetap diikuti oleh 3 partai sebelumnya, Golkar, PPP dan PDI dengan komposisi perolehan suara tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya yang mana Golkar masih menempati urutan pertama, disusul PPP kemudian PDI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985, maka pemilu pada tahun 1987 masih diikuti oleh tiga peserta. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir masa orde baru. Konstelasi yang ada dalam parlemen sebagai hasil pemilu inipun masih sama. Dalam peringkat perolehan suara, Golkar menempati urutan pertama, PPP kedua, dan PDI ketiga.<sup>59</sup>

Bergulirnya agenda reformasi yang banyak menelan korban, memicu pula terjadinya pemilu pada tahun 1999. Peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan pada waktu itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 4 Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.<sup>60</sup>

Berangkat dari proses ini, maka perkembangan mengenai konsep demokrasi di Indonesia terlihat lebih matang. Agenda lima tahunan untuk memilih rakyat sebagai salah satu bentuk dari implementasi salah satu indikator terlaksananya demokrasi yaitu terjadinya rotasi kekuasaan. Sejumlah Ilmuwan Politik merumuskan parameter atau indikator terlaksananya demokrasi pada sebuah Negara jika memenuhi beberapa unsur yaitu antara lain akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan menikmati hak-hak dasar.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, h. 95.

<sup>60</sup>Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, h. 95-96.

<sup>61</sup>Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment Dalam ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007) h. 22-23.

Partai politik memiliki peran fundamental dalam negara demokrasi yang merupakan institusi penyangga bekerjanya demokrasi perwakilan di Negara Indonesia. Selama demokrasi perwakilan masih dipandang sebagai cara paling masuk akal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka keberadaan partai politik sebagai organisasi yang hidup dan tumbuh ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan perannya.<sup>62</sup>

Secara teoritis partai politik setidaknya memiliki lima fungsi yang semestinya diperankan dalam proses kehidupan bernegara yang demokratis, yaitu:

a. Artikulasi Kepentingan

Setiap individu ataupun kelompok masyarakat sebagai warga negara memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan itu bisa sejalan dan bisa berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Parpol harus bisa memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga kepentingan-kepentingan rakyat dapat terlayani oleh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memegang kedaulatan. Kalau parpol mampu memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat seperti itu, maka parpol yang demikian akan memperoleh dukungan rakyat. Sebaliknya jika parpol tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, maka ia akan ditinggalkan oleh pemilihnya.

b. Agregasi Kepentingan

Rakyat sebagai warga negara memiliki berbagai kepentingan yang diajukan untuk dipenuhi oleh kebijakan publik. Parpol dalam proses perumusan kebijakan publik harus dapat memerankan fungsinya menggabungkan kepentingan-kepentingan

---

<sup>62</sup>Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), h. 5

yang merupakan tuntutan rakyat menjadi alternatif-alternatif terbaik yang memenuhi aspirasi rakyat. Menggabungkan kepentingan-kepentingan yang beragam yang terkadang bertentangan menjadi alternatif-alternatif terbaik membutuhkan intelektualitas yang tinggi. Parpol yang mampu memerankan fungsinya seperti itu akan menjadi pilihan rakyat. Sebaliknya Parpol yang tidak mampu memerankan fungsinya akan ditinggalkan.

#### c. Sosialisasi Politik

Setiap negara memiliki nilai-nilai dan etika politik yang dipandang baik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Parpol harus memerankan fungsinya menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku kepada warga negara. Sosialisasi nilai-nilai dan etika politik harus dilakukan secara terus menerus. Parpol yang tidak melakukan sosialisasi politik dapat dipertanyakan komitmennya terhadap negara. Di sisi lain rakyat seharusnya bisa berlaku kritis terhadap parpol yang demikian.

#### d. Rekrutmen Politik

Parpol memiliki kepentingan untuk menempatkan kader-kadernya pada jabatan-jabatan politik di pemerintahan untuk menyuarakan dan mengajukan kepentingan partai dan rakyat yang diwakili. Agar dapat menempatkan kader-kader terbaik di pemerintahan, Parpol harus mampu memerankan fungsinya melakukan rekrutmen politik. Parpol harus memiliki prosedur rekrutmen politik yang diberlakukan bagi kadernya. Dalam rekrutmen politik inilah parpol seharusnya menunjukkan kemampuan berdemokrasi di internal partai. Kalau di internal partai tidak bisa berdemokrasi, bagaimana parpol bisa berdemokrasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara.

e. Komunikasi Politik

Melalui komunikasi politik parpol mengkomunikasikan informasi, isu, gagasan dan program-program partai sehingga dapat diketahui oleh rakyat. Segenap struktur partai supaya dapat memerankan fungsinya melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia secara legal. Muara dari semua peran parpol itu adalah formulasi dan implementasi kebijakan publik yang merespon kepentingan rakyat.<sup>63</sup>

Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi antara lain:

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang

---

<sup>63</sup>Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik, Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 230.

lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader.

d. Sebagai Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi posisinya dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari para warga dari pada aktivitas mandiri.

e. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.<sup>64</sup>

Dari penjelasan sebelumnya mengenai fungsi dari partai politik, dapat dipahami bahwa partai politik sejatinya digunakan bukan hanya sebagai- alat untuk

---

<sup>64</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 167.

memperoleh kekuasaan dari masyarakat yang akan dipimpinnya, tetapi partai politik juga berfungsi dalam memberikan pendidikan dan pemahaman yang benar dalam berpolitik sehingga dari proses tersebut tercipta suatu pemimpin yang dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai pemilih yang akan berdampak pada iklim yang kondusif pada jalannya roda pemerintahan. Namun pada pelaksanaan di lapangan, fungsi dari partai politik yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga terjadi konflik-konflik yang dilakukan baik oleh para elit partai politik maupun para pendukung dari pasangan calon yang akan berkontestasi dalam pilkada.<sup>65</sup>

#### **D. Konsep Islam Terhadap Politik di Pilkada**

Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin pada umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya di makamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Saqifah, Madinah.<sup>66</sup>

Sebelum tokoh-tokoh Muhajirin hadir dalam pertemuan itu, golongan Khazraj telah sepakat mencalonkan Saad bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj, untuk menjadi pengganti Rasul dalam memerintah. Tetapi Aus belum memberikan persetujuan atas pencalonan itu. Kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka, suatu perdebatan yang bisa membawa pada perpecahan umat Islam.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Y. Ambeg Paranarta. dkk, *Peran Elit Politik Dan Partai Politik Dalam Mencegah Konflik Di Pilkada*, h. 51.

<sup>66</sup>Moh. Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 45.

<sup>67</sup>J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Garafindo Persada Utama, 1994), h. 103.

Umar begitu mengetahui perkembangan yang terjadi, segera mengutus untuk menemui Abu Bakar yang berada di rumah nabi bersama Ali Bin Abi Thalib dan memintanya agar Abu Bakar keluar untuk menemui Umar. Tapi Abu Bakar menolak dengan alasan sibuk. Kemudian Umar kembali menyuruh seseorang untuk menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa telah terjadi suatu peristiwa penting yang menuntut kehadirannya. Dengan alasan itu akhirnya Abu Bakar mau keluar dan menemui Umar. Umar kemudian bergegas bersama Abu Bakar menuju tempat pertemuan itu. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Abu Ubadah Bin al-Jarrah, sahabat senior dari sahabat Muhajirin, dan ia mereka diajak untuk ikut serta, ketika ketiga tokoh tersebut tiba di Balai Saqifah, ternyata disana sudah hadir pula orang-orang Muhajirin yang terlibat perdebatan sengit dengan kaum Anshar karena sama-sama mempertahankan hak dan pendirian mereka. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam, seperti yang di kemukakan Hubab Bin al-Munzir, yaitu meminta dari Anshar seorang pemimpin dan dari Muhajirin satu pemimpin. Usulan ini dianggap Umar dengan mengatakan, " Tidak ada dua orang pemimpin dalam satu waktu dan satu wilayah kekuasaan". Orang-orang Qurasy sebagai wali dan keluarga Rasul lebih berhak meneruskan kepemimpinannya. Hubab menanggapi Umar seraya berkata, "Wahai kaum Anshar, tetaplah kamu dengan pendirian kamu, jangan dengar pendapat Umar dan sahabat-sahabatnya, berpegang teguhlah kamu dengan perkataan ini, sebab kamu lebih berhak dari mereka".<sup>68</sup>

Melihat situasi yang menegangkan dan bisa mengancam keutuhan umat tersebut, Abu Ubadah bin Jarrah mengajak kaum muslimin untuk menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin dan lebih toleran. Kemudian Basyir bin Sa'ad Abi al-

---

<sup>68</sup>J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah*, h. 103-105.



Nu'man bin Basyir, salah seorang pemimpin suku Khazraj, berdiri sambil berkata, ” Wahai orang-orang Ansor, demi Allah sesungguhnya kita paling utama dalam memerangi kaum musyrik dan membela agama ini, kita tidak menghendaknya kecuali atas ridha Allah dan ketaatan kita terhadap Nabi, maka tidaklah tepat apabila kita memperpanjang masalah ini. Bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu saling berselisih dan bertentangan dengan mereka (Muhajirin)”. Pandangan Basyir ini berhasil membuat suasana menjadi tenang.<sup>69</sup>

Selanjutnya Abu Bakar berbicara pada para hadirin, ” Ini Umar dan Abu Ubadah, siapa yang kamu kehendaki, maka hendaklah kamu bai’at, ”Keduanya berkata, ” Demi Allah kami tidak lebih berhak, karena engkau orang Muhajirin yang utama dan pengganti rasul untuk menjadi imam dalam shalat dan shalat itu paling utama dalam agama kaum muslim, maka engkau lah yang paling berhak dalam masalah ini, maka ulurkanlah tanganmu dan kami akan membai’atmu”. Ketika keduanya hendak menyatakan bai’at, Basyir bin Sa’ad mandahului keduanya untuk membai’at Abu Bakar. Lalu diikuti oleh Umar dan Abu Ubadah serta mereka yang hadir baik dari golongan Ansor maupun golongan Muhajirin.<sup>70</sup>

Ada satu sahabat yang tidak mengakui Abu Bakar sebagai khalifah dan tidak membai’atnya selama enam bulan yakni Ali, karena Ali mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa ia memiliki klaim yang kuat untuk mengganti Nabi Muhammad. Hanya Ali orang yang paling aktif dan juga orang yang paling bersemangat dalam seluruh usaha demi Islam dan sebagai pendekar besar di garis depan dari seluruh pertempuran yang dilakukan di bawah Nabi. Walau pun ada satu sahabat yang tidak mau membai’at, tetapi berlangsung pembai’atan oleh umat Islam.<sup>71</sup>

<sup>69</sup>J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah*, h. 105.

<sup>70</sup>J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah*, h. 106.

<sup>71</sup>S. H. M. Jafri, *Dari Saqifah Sampai Imamah* (Bandung, Pustaka Hidayah, 1995), h. 96.

Abu Bakar dibai'at berkat kepiawaian dan keberanian yang ditunjukkan Umar. Bai'at pertama dinamai bai'at khusus karena bai'at tersebut hanya dilakukan sekelompok kecil kaum muslimin yang ada di Saqifah. Sedangkan bai'at kedua dilakukan esok harinya secara umum di masjid Nabi yang dilakukan oleh penduduk Madinah.<sup>72</sup>

Bai'at sendiri diartikan sebagai sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakat. Bai'at identik dengan sebuah perjanjian dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian.<sup>73</sup>

Pemilihan Abu Bakar di Balai Kota Saqifah oleh sekelompok kecil dari lima orang selain Abu Bakar sendiri, yakni Umar bin Khattab, Abu Ubadah bin Jarrah, Basyir bin Sa'ad, Usayd bin Khudair, dan Salim, seorang budak Abu Khuzayfah yang telah dimerdekakan.<sup>74</sup>

Pemilihan Abu Bakar tersebut tidak didasarkan pada keturunan atau kesenioran atau kerena pengaruhnya, tetapi karena beliau memiliki kapasitas pemahaman agama yang paling tinggi, berakhlak mulia, dermawan, paling dahulu masuk Islam, serta sangat dipercaya oleh Nabi. Seandainya pemilihan didasarkan pada keturunan, kesenioran dan pengaruhnya, tentulah mereka akan memilih Sa'ad bin Ubadah, pemimpin golongan Khazraj, atau Abu Sufyan, pemimpin Bani Umayyah dan al-Abbas, pemuka golongan hasyimi, karena mereka lebih senior dan berpengaruh dari Abu Bakar.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup>J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah*, h. 106.

<sup>73</sup>Khilid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintah Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 81.

<sup>74</sup>Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 23.

<sup>75</sup>Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 107.

Umar bin Khattab menjadi khalifah lewat penunjukan khalifah Abu Bakar dan tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan Al-Sahabi, dan kemudian dibai'at. Umar menjadi sebagai khalifah selama sepuluh tahun enam bulan, yaitu dari tahun 23-35 H / 644-656 M.<sup>76</sup>

Peristiwa pengangkatan Umar sebagai khalifah itu merupakan fenomena yang baru, tetapi haruslah dicatat bahwa proses peralihan pemimpin tetap dalam bentuk musyawarah, yaitu berupa usulan atau rekomendasi dari Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam. Untuk menjajaki pendapat umum, Abu Bakar melakukan serangkaian konsultasi terlebih dahulu dengan beberapa orang sahabat, antara lain Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan dan Asid bin Khadir, seorang tokoh Ansor.<sup>77</sup>

Penunjukan Umar sebagai khalifah itu terjadi ketika Abu Bakar mendadak jatuh sakit dan selama lima belas hari tidak dapat keluar untuk bersembahyang di masjid. Abu Bakar menyuruh Umar bin Khatab untuk mengantikan sebagai imam shalat. Ketika Abu Bakar merasa sakitnya semakin parah, ia merasa cemas bilamana persoalan disekitar pengangkatan khalifah seperti yang lalu akan terjadi lagi, karena kenangan di balai Saqifah masih segar dalam ingatannya, sebagai timbul kekhawatiran kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajalnya segera datang. Kalau peristiwa seperti lalu akan terjadi lagi, maka kaum muslimin akan terpecah dan perpecahan ini akan lebih membahayakan mereka sendiri dari pada bahaya yang muncul dari pemberontakan orang-orang murtad. Atas dasar ini, ia berketetapan untuk mengangkat orang yang diyakini mampu dan baik strategi politiknya sebagai calon pengantinya. Bagi Abu Bakar orang paling tepat untuk menggantikannya tidak

<sup>76</sup>Joeseof Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 141.

<sup>77</sup>Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 53.

lain adalah Umar bin Khatab. Penunjukan ini bagaimana pun juga telah didahului oleh suatu konsultasi informasi dari sahabat-sahabat nabi yang senior, dan semua sahabat yang diajak konsultasi merasa setuju sekali.<sup>78</sup>

Abu Bakar kemudian memanggil Usman bin Affan supaya menuliskan pesannya sesuai dengan pesan tertulis tersebut. Sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu bai'at secara umum dan terbuka di Masjid Nabawi. Ustman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui proses yang lain lagi, tidak sama dengan Abu Bakar, dan hampir serupa dengan Umar. Dia dipilih oleh sekelompok dan nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia wafat.<sup>79</sup>

Pada pertengahan tahun kesebelas kekhalifahannya, Umar menderita luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia yang bernama Fairus atau yang biasa dikenal dengan Abu Lu'lu'ah. Waktu datangnya sejumlah tokoh masyarakat kepada Umar supaya segera menunjuk seorang penggantinya. Mereka khawatir, Umar tidak akan bisa hidup lagi akibat luka-lukanya itu. Kalau sampai Umar wafat sebelum menunjuk penggantinya, dikhawatirkan akan terjadi pertentangan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Umar menolak usulan mereka, tetapi mereka keesokan harinya kembali lagi dan mendesak Umar untuk segera menunjuk seorang pengganti. Akhirnya Umar hanya menyebut enam sahabat senior. Sepeninggal Umar, salah seorang dari sahabat inilah yang harus dipilih untuk menjadi khalifah. Keenam orang sahabat tersebut adalah Usman Bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair Ibnu Awwam, Sa'ad Ibnu Abi Waqqasy dan Abdul Rahman Ibnu 'Auf.<sup>80</sup>

<sup>78</sup>Hasan Ibrahim, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 285.

<sup>79</sup>Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 25.

<sup>80</sup>Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 25.

Setelah Umar wafat, keenam sahabat ini berkumpul untuk memusyawarahkan siapa yang akan menjadi pengganti Umar. Sebelum wafat Umar sempat berpesan supaya mereka berunding dalam waktu paling lama 3 hari, dan pada hari keempatnya sudah ada seorang khalifah yang baru. Jalannya pertemuan tersebut sangat sulit karena pada waktu itu Talhah tidak ada di Madinah. Kemudian Abdul Rahman bin 'Auf mencoba memperlancar keadaan dengan mengimbau agar ada yang bersuka rela untuk mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada yang betul-betul memenuhi syarat untuk menjadi khalifah. Tetapi himbauannya tidak didengar sama sekali.<sup>81</sup>

Dalam keadaan genting Abdul Rahman bermusyawarah dengan segenap lapisan kaum muslim, begitu juga dengan segenap calon khalifah. Melalui hasil musyawarah keenam orang sahabat dan konfirmasi dengan umat islam lainnya, munculnya dua orang calon utama, yakni Utsman dan Ali. Dengan pertimbangan usia dan kesenioran, Utsman terpilih menjadi khalifah menggantikan Umar. Setelah terpilih, pembai'tan Utsman dilakukan secara umum oleh semua rakyat di kota Madinah.<sup>82</sup>

Ali bin Abi Talib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna karena pada pemberontakan setelah membunuh Utsman, mendesak Ali agar bersedia menjadi khalifah. Pembai'tan Ali sebagai khalifah berlangsung di tengah-tengah berkubang atas wafatnya Utsman.<sup>83</sup>

Terdapat perbedaan antara Abu Bakar, Utsman dan Ali. Pada pemilihan Abu Bakar dan Utsman terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon-

---

<sup>81</sup>Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 25-26.

<sup>82</sup>Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 21.

<sup>83</sup>Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 26.

calon itu terpilih dan diputuskan menjadi khalifah, orang-orang tersebut menerimaannya dan ikut membai'at serta menyatakan kesetiaannya, termasuk Ali, baik terhadap Abu Bakar maupun Utsman. Sedangkan Ali menetakannya sebagai khalifah ada yang menolak dan ada yang menyetujui. Yang menyetujui adalah mayoritas rakyat dari kalangan Muhajirin, Ansor dan pada tokoh sahabat senior. Mereka membai'at Ali di Masjid Nabawi. Sedangkan yang menolak adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, keluarga Utsman yang menjadi gubernur Suriah. Mu'awiyah menolak penetapan Ali sebagai khalifah dengan alasan: pertama; Ali harus bertanggungjawab atas terbunuhnya Utsman; dan kedua, berhubung wilayah Islam telah meluas dan timbul komunikasi-komunikasi Islam di daerah baru itu, maka hak untuk menentukan pengisian jabatan khalifah tidak lagi merupakan hak mereka yang berada di Madinah.<sup>84</sup>

Periode pemerintah Khulafaur Al Rasyidin berakhir dengan wafatnya Ali yang kemudian muncul tokoh politik menggantikan Ali yakni Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Ia juga pendiri dari khalifah pertama dinasti ini. Terbentuknya dinasti Umayyah ini juga semata-mata peralihan kekuasaan, tapi mengandung masalah dan perubahan. Diantara perubahan tersebut adalah, kalau selama masa Khulafa Al Rasyidin, khalifah dipilih oleh tokoh sahabat Madinah kemudian dilanjutkan dengan bai'at oleh masyarakat umum, maka hal serupa ini tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Semenjak Umayyah, raja-raja Umayyah yang berkuasa berhak menunjuk pengantinya kelak dan para pemuka agama diperintahkan menyatakan sumpah kesetiaan dihadapan raja. Oleh karena itu, Mu'awiyah adalah

---

<sup>84</sup>Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 27-28.

penguasa Islam pertama yang menggantikan sistem demokratis islam menjadi sistem monarkis (kerajaan).<sup>85</sup>

Muawiyah menjadi khalifah karena Hasan bin Ali mengundurkan diri dari khaliafah yang menggantikan 'Ali bin Thalib. Alasan dari pengunduran dari Hasan ini disebabkan ia tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi yang lebih besar karena Umayyah memproklamirkan diri menjadi khalifah di Ilyah (Palestina), setelah pihaknya dinyatakan oleh majelis tahkim sebagai pemenang. Muawiyah dikenal sebagai politikus dan administrator, juga seorang yang cakap dalam urusan politik pemerintahan. Ia juga dikenal sebagai seorang negarawan yang ahli bersiasat, ahli dalam merancang taktik dan strategi. Menjelang akhir hayatnya Mu'awiyah menunjuk anaknya, Yazid sebagai calon pengantinya. Itulah titik awal dari lahirnya sistem monarki atau kerajaan dari suatu negara Islam, dimana pengisian jabatan kepala negara ditentukan atas dasar keturunan. Tradisi ini terus berlanjut akhir dari dinasti yang ditumbangkan 'Abbasiyah.<sup>86</sup>

Setelah pemerintahan dinasti Umayyah jatuh, kekuasaan khalifah jatuh ke tangan Bani Abbas, keturunan bani Hasyim yang juga sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dibangun melalui perjuangan yang panjang dari gerakan politik dan kekuatan senjata yang dibantu oleh kaum Syiah dan orang-orang Persi. Gerakan ini berhasil menjatuhkan dinasti Umayyah pada tahun 750 M dan pada tahun itu juga Abu al- Abbas diangkat menjadi khalifah pada pemerintahan Abbasiyah, tetap menganut bentuk pemerintahan monarki hanya saja ada penambahan gelar khalifah sebagai "Bayangan Allah di Bumi".<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*, h. 52.

<sup>86</sup> J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah*, h. 162.

<sup>87</sup> M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut fazlur Rahman* (Yogyakarta: Uli Press, 2000), h. 74-75.



Salah satu dinasti Islam terlama adalah Abbasiyah. Para sejarawan membagi masa kekuasaan Abbasiyah menjadi beberapa periode berdasarkan ciri, pola perubahan pemerintahan, dan struktur sosial politik maupun tahap perkembangan peradaban yang dicapai. Berbeda dari pendahulunya, Dinasti Abbasiyah mendistribusikan kekuasaan secara lebih luas, baik orang Arab maupun Muslim non-Arab. Sejak berkuasa, penguasa Abbasiyah mengangkat ulama terkenal untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan peradilan diserahkan sepenuhnya kepada para hakim, yang diangkat oleh pemerintah pusat. Mereka melaksanakan fungsi yudikatif, bebas dari intervensi penguasa. Birokrasi juga mulai ditumbuhkan pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Di antaranya, adanya jabatan baru, yaitu wazir (penasihat khalifah), pembagian departemen, seperti militer, administrasi, dokumentasi, dan perbendaharaan. Selanjutnya, wilayah kekuasaan di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur (amir). Khalifah juga mengangkat hakim agung (qadli al-quḍlat) di setiap provinsi untuk mengatasi masalah-masalah hukum.<sup>88</sup>

Setelah bani Umayyah dan Abbasiyah, kerajaan Islam terbesar dan terkuat adalah Turki Utsmani. Kerajaan ini bertahan sampai 600 tahun mulai abad ke 14 sampai abad ke 20, yaitu mulai Utsman 1 tahun 1299 sampai Abdul Majid 2 tahun 1922. Turki Utsmani masih dalam bentuk kerajaan karena waktu itu masih dalam bentuk kerajaan, hingga Kemal Attaturk merubahnya menjadi negara Republik dan ditegaskan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat. Bidang pemerintahan, bentuk kerajaan Turki Utsmani mengikuti sistem feodal, dimana sultan adalah penguasa tertinggi baik dalam bidang agama, pemerintahan, politik bahkan masalah perekonomian. Sudah jelas dengan bentuk pemerintahan feodal, maka dalam

---

<sup>88</sup>M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut fazlur Rahman*, h. 75-76.



pemilihan pemimpin sudah menjadi hak sepenuhnya yang akan dilakukan sultan yang memimpin pada saat itu.<sup>89</sup>

Pemilihan umum dalam sejarah peradaban Islam ditemukan juga dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya Baiat al-Nuqabâ' (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.<sup>90</sup>

Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada Rasulullah Saw. dalam keadaan Muslim dan memberi baiat. Ia memohon kepada Nabi Saw. agar mengembalikan harta mereka (yang dirampas karena perang). Nabi pun minta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.<sup>91</sup>

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya. Begitu juga periode sesudah Nabi Saw., yaitu pada masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn. Pemilihan al-Khulafâ' al-Râsyidûn berbeda

<sup>89</sup>M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut fazlur Rahman*, h. 80.

<sup>90</sup>Samuddin Rapung, *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Cet. I; Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 304.

<sup>91</sup>Samuddin Rapung, *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, h. 304-305.

dengan metode pemilu yang dikenal sekarang. Pemilihan umum yang dikenal pada masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn dapat ditemui janji setia (baiat) dari masing-masing khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat) dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga di sini ada keterlibatan dan peran rakyat dalam baiat khalifah.<sup>92</sup>

Pada saat pemilihan Abû Bakr yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abû Bakr, yaitu 'Umar ibn al-Khaththâb, Abû Ubaydah ibn Jarah, Basyîr ibn Sa'ad, Asid ibn Khudayr dan Sâlim, seorang budak Abû Khudzayfah yang telah dimerdekakan.<sup>93</sup>

Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan 'Umar ibn al-Khaththâb yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abû Bakr. Meskipun demikian, 'Umar ibn al-Khaththâb menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika 'Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau juga melarang bahwa barangsiapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.<sup>94</sup>

Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin). Riwayat selanjutnya adalah

---

<sup>92</sup>Samuddin Rapung, *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, h. 305.

<sup>93</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 23.

<sup>94</sup>Samuddin Rapung, *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, h. 306.

perbuatan ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf ketika bermusyawarah dan meminta pendapat rakyat untuk menetapkan siapa yang laik menjadi seorang khalifah setelah ‘Umar ibn al-Khaththâb wafat. Diwirayatkan bahwa ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf selama tiga hari bermusyawarah dan meminta pandangan rakyat hingga mantap pilihan jatuh pada ‘Ustmân ibn ‘Affân. Saat itu beliau berkata bahwa beliau melihat pilihan manusia tidak bergeser pada Ustmân.<sup>95</sup>

Riwayat ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan ‘Alî ibn Abî Thâlib, dipilih melalui pemilihan, meskipun banyak yang menentangnya. Pada saat ‘Alî ibn Abî Thâlib terpilih, ‘Alî ibn Abî Thâlib menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari ahl al-hall wa al-‘aqdî. ‘Alî ibn Abî Thâlib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau.<sup>96</sup>

Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena adanya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyukseskan baiat seorang pemimpin (khalifah). Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat digambarkan yaitu: (1) Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh al-Khulafâ’ al-Râsyidûn, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan. (2) Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka.<sup>97</sup>

<sup>95</sup>Hadis riwayat al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, No. 6781.

<sup>96</sup>Abû Ja’far al-Thabarî, *Târîkh al-Thabarî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), h. 75.

<sup>97</sup>Samuddin Rapung, *Fiqih Demokrasi Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, h. 308.

Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban. Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan tersebut adalah: (1) Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh ahl al-hall wa al-‘aqdi, kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abû Bakr atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada baiat ‘Alî ibn Abî Thâlib. (2) Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas.<sup>98</sup>

Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka memberikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus dari ahl al-hall wa al-‘aqdi terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang dikedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan ahl al-hall wa al-‘aqdi dan bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini. (3) Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi

---

<sup>98</sup>Samuddin Rapung, *Fiqh Demokrasi Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, h. 308-309.

untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh ahl al-hall wa al-'aqdi atau ikut serta (bersama ahl al-hall wa al-'aqdi) dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu.<sup>99</sup>



---

<sup>99</sup>Samuddin Rapung, *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, h. 310.

## BAB III

### METODODOLOGI PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>1</sup> Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.<sup>2</sup> Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini dalam ilmu sosial adalah Penelitian Kualitatif, menurut Creswell (1998), penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang<sup>3</sup> untuk membuat pendaaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>4</sup> Namun dalam penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian

---

<sup>1</sup>Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: t.p, 2004), h. 1-2.

<sup>2</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 3.

<sup>3</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34.

<sup>4</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.

terhadap efektivitas hukum, yang bertujuan untuk menelaah perilaku hukum warga masyarakat.<sup>5</sup> Penelitian hukum empiris awalnya yang diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.<sup>6</sup>

Lokasi Penelitian akan dilakukan Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar dapat berjalan dengan baik dan Kota Makassar yang kita kenal sebagai daerah sentral politik di Sulawesi Selatan sebab di Kota Makassar saat ini sedang berlangsung pasca pemilihan umum walikota Makassar. Selain itu, peneliti juga berdomisili di Kota Makassar sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Maka dari itu Kota Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian yang baik untuk penelitian mengenai masalah yang akan diteliti.

## **B. Pendekatan Penelitian**

### **1. Pendekatan Penomenologi**

Pendekatan penomenologi yaitu tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia. Selain itu pendekatan ini yaitu pendekatan secara membumi dengan melihat kultur masyarakat serta respon masyarakat terkait fenomena dan konstruk sosial masyarakat yang ada. Serta pendekatan secara filosofis mendalam terhadap masyarakat dengan artian lain, pendekatan ini adalah pendekatan terhadap fenomena yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51.

## 2. Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syariah terkhusus fiqh Islam dan syiyasah syari'iah yang terkait dengan politik dinasti yang ada di Kabupaten Gowa.

### C. *Sumber Data*

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun sumber data yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kota Makassar dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran elit politik terhadap pilkada Kota Makassar.

Adapun sumber data primer ini jumlahnya 16 orang informan. Dari 10 orang tersebut terdiri dari Partai Golkar, PPP, PKB, dan Gerindra, masing-masing partai ada 2 orang informan yaitu ketua dan sekretaris partai masing-masing dan 2 orang dari Anggota DPRD yaitu ketua dan seketaris. Peneliti memilih mereka sebagai sumber informan karena mereka adalah elit politik yang mengetahui kultur politik dan secara kolektif mewakili struktural elit politik yang ada di Kota Makassar. 6 orang tokoh masyarakat yang diwakili oleh ormas Islam Nahlatul Ulama, oraganisasi kemahasiswaan PMII dan Dosen Tata Negara yang masing-masing 2 orang untuk ormas Islam dan organisasi kemahasiswaan antara ketua dan seketaris. Peneliti memilih mereka sebagai sumber informan. Karena penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan syar'i oleh karena itu dianggap bahwa ormas Islam



yang disahkan oleh undang-undang itu dapat mewakili secara keseluruhan masyarakat Kota Makassar. Peneliti memilih organisasi kemahasiswaan dan dosen tata negara sebagai informan karena mereka mewakili seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar.

**Tabel I**

*Tentang Informan*

NO	NAMA	INFORMAN	KET
1	Anggota DPRD Kota Makassar	2	
2	Partai Politik		
	Partai Golkar	2	
	Partai PPP	2	
	Partai PKB	2	
	Partai Gerindra	2	
3	Osma Islam		
	Nahlatul Ulama (NU) Makassar	2	
4	Organisasi Kemahasiswaan		
	PMII Sul – Sel	2	
5	Dosen Tata Negara	2	
<b>JUMLAH</b>		16 orang	

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder

dikumpulkan melalui *Library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:

a. Kutipan Langsung

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.

b. Kutipan Tidak Langsung

Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap sama.

**D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau Pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.<sup>7</sup> Peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

---

<sup>7</sup>M.Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114.

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>8</sup>

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.<sup>9</sup>

### 3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.<sup>10</sup>

### **E. *Instrument Penelitian***

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, baik data yang kualitatif maupun kuantitatif.<sup>11</sup>

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sebagai instrumen penelitian
2. Pedoman wawancara
3. Handphone
4. Camera
5. Alat tulis

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004 ), h. 82.

<sup>9</sup> Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* , h. 184.

<sup>10</sup> Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* , h. 189.

<sup>11</sup> Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* , h. 120.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

- a. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
- c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.
- e. Editing yaitu apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>12</sup>

### **2. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 125.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengujian keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar.<sup>13</sup> Dalam keabsahan data ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.



---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2009), h. 270.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Setting Lokasi Penelitian***

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat bagian selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat  $119^{\circ}, 18', 27', 97''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}, 8', 6', 19''$  Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 175,77 km<sup>2</sup> yang meliputi 14 kecamatan.

Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5–10 meter dari permukaan laut.

Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau Sangkarang, atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, dan Pulau Kayangan (terdekat).

Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen). Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen), dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28 persen). Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km persegi), Kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km persegi).

Sedang Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi, kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km persegi), Manggala (4.163 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km persegi), Kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi.

Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala.

Kota Makassar yang terus berkembang sebagai salah satu sentra perekonomian utama Indonesia dan dihadapkan dengan tantangan untuk

mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi Kota Makassar, dan juga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan data BPS awal Desember 2009, jumlah penduduk miskin di kota Makassar ini mencapai 62.096 jiwa. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kecamatan Tamalate dengan 9.267 jiwa. Disusul Kecamatan Tallo 8.158 jiwa, Kecamatan Rappocini 6.409 jiwa, Kecamatan Makassar 6.355 jiwa dan Kecamatan Panakkukang 6.237 jiwa.

Kemiskinan di kota besar, khususnya kota Makassar, yang mungkin dipicu oleh rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dasar ataupun pelatihan kerja bagi masyarakat yang notabene berpendidikan rendah yang diikuti dengan sulitnya memenciptakan lapangan usaha sendiri yang mampu membantu ekonomi masyarakat miskin lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadikan banyak keluarga yang terperangkap di dalam lingkaran setan kemiskinan. Banyak anak-anak dari Rumah tangga Miskin yang tidak mampu mengenyam pendidikan bahkan pada level minimal, menjadikan masa kecil yang direnggut oleh beban ekonomi keluarga yang mengharuskan untuk bekerja mencari nafkah guna membantu keuangan keluarga. Hal lain yang juga mempengaruhi tingkat pendapatan, berkaitan erat antara aspek pendidikan dan kesehatan di dalam masyarakat, misalnya kesadaran untuk melakukan progam KB (Keluarga Berencana), menjadikan jumlah anak dalam sebuah rumah tangga yang tidak terkontrol, sehingga membuat biaya tanggungan rumah tangga tersebut menjadi semakin tinggi.

Pada kesehariannya, masyarakat yang tergolong miskin akan ditemukan pada pemukiman-pemukiman yang miskin pula. Di dalam lingkungan tersebut ditemukan tingkat kesadaran terendah dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan



demis berlangsungnya kehidupan yang sehat baik fisik maupun psikis agar dapat menjaga kemampuannya untuk mempertahankan faktor produksinya.

## **B. *Kondisi Sosial Politik Kota Makassar***

Kondisi politik Kota Makassar saat ini merupakan sejarah politik yang baru. Karena adanya pertarungan antara kandidat jalur perseorangan melawan jalur koalisi partai politik yaitu M. Ramdhan Danny Pomanto berpasangan dengan Indira Mulyasari Paramastuti (DIAMI) melawan Munafri Arifuddin berpasangan dengan Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Pasangan DIAMI menempuh jalur perseorangan sedangkan Appi-Cicu menempuh jalur usungan koalisi partai politik. Persaingan yang sangat kompetitif ini akan sangat mempengaruhi alur sosial politik yang di Kota Makassar.<sup>1</sup>

Baik jalur partai politik maupun jalur perseorangan sama - sama punya peluang kemenangan meski pilwalkot sebelumnya kemenangan di dominasi pasangan jalur parpol. Saat ini lebih ke pertarungan untuk menguji potensi basis massa masing - masing, baik jalur partai politik maupun jalur perseorangan.<sup>2</sup>

Sangat sulit untuk partai politik yang besar mendukung kandidat di jalur perseorangan. Meskipun tidak semua juga harus berada di koalisi penantang. Faktor pragmatisme elektoral membuat partai sulit untuk berperan optimal pada kerja – kerja elektoral kandidat independen DIAMI yang akan banyak mengandalkan jejaring relawan berbasis ormas dan birokrasi. Pilwalkot Makassar 2018 akan menjadi pertarungan antar jejaring politik dengan basis massa yang berbeda. Pertarungan jejaring politik berbasis ormas dan birokrasi melawan jejaring politik berbasis partai politik dan korporasi akan memberikan dampak sosial yang besar pada masyarakat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Rahman Arsyad, *Wawancara Pengamat Politik*, 22 Maret 2018.

<sup>2</sup>Herman Baba, *Wawancara Pengamat Hukum Tata Negara*, 21 Maret 2018.

<sup>3</sup>Herman Baba, *Wawancara Pengamat Hukum Tata Negara*, 21 Maret 2018.

Jika melihat dari kacamata politik kemungkinan yang akan menang pada pilwakot Makassar 2018 adalah pasangan Appi-Cicu. Karena secara umum diketahui partai politik memiliki basis massa dari kadernya sangat banyak. Tetapi, jika melihat respon dari masyarakat kemungkinan yang akan menang adalah pasangan DIAMI. Karena pasangan DIAMI telah memberikan banyak bukti sosial yang baik yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sosial di Kota Makassar pada saat masa jabatannya. Seperti dengan hasil survey yang pernah dilakukan oleh Celebes Reserach, pada saat itu data responden pasangan DIAMI lebih unggul dari data responden pasangan Appi-Cicu.<sup>4</sup>

Pertarungan pasangan DIAMI dengan pasangan Appi-Cicu pada pilwakot Makassar 2018 telah memberikan dampak besar terhadap sosial politik yang ada di Kota Makassar. Salah satu dampaknya mampu mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap kader partai. Karena adanya kader partai yang telah melakukan pernyataan terang – terangan mengenai perbedaan dukungan dengan keputusan partainya.<sup>5</sup>

### ***C. Peran Elit Politik Terhadap Pilkada Kota Makassar Telaah Ketatanegaraan Islam***

Peran merupakan konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Herman Baba, Wawancara Pengamat Hukum Tata Negara, 21 Maret 2018.

<sup>5</sup>Erick Horas, Wawancara Anggota DPRD dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Makassar, 16 Maret 2018.

<sup>6</sup>Dewi Wulansari, *Sosiologi (Konsep dan Teori)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 106.

Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.<sup>7</sup>

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Elit adalah sekelompok kecil dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting. Dalam perkataan lain elit juga merupakan segolongan kecil yang memperoleh sebagian besar dari nilai apa saja, elit itu menunjuk pada mereka yang berpengaruh.<sup>9</sup>

Elit politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam

---

<sup>7</sup>Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), h. 67.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2009), h. 213.

<sup>9</sup>Syarifuddin Jurdi, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h. 21.

sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan teori dan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan elit politik adalah perseorangan atau sekelompok yang memiliki kekuasaan politik seperti Anggota Dewan, Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama ataupun orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk menguasai orang lain di lingkungan tertentu. Dan peran elit politik dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang merupakan hak maupun kewajiban yang dilakukan oleh penguasa dalam sebuah kondisi berpolitik dan bermasyarakat. Peran yang dimaksud merupakan status yang berupa tindakan untuk dapat dilaksanakan demi menjaga keseimbangan alur politik serta kehidupan bermasyarakat dan melaksanakan harapan masyarakat terhadap elit politik.

Elit politik yang dimaksudkan dalam penelitian adalah Anggota DPRD yang termasuk sebagai struktural partai politik dan pejabat teras pada struktur partai politik.

Pilkada pada umumnya tidak lepas dari peran para elit politik begitu juga yang terjadi pada Pilkada Kota Makassar. Elit politik yang ada di Kota Makassar pada waktu menjelang pemilihan kepala daerah banyak bermunculan. Baik itu dari partai politik maupun dari para tokoh masyarakat dan pengusaha. Dan bahkan ada yang dari luar daerah Kota Makassar.

Peran dari elit politik terhadap proses pilkada sangat diharapkan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota yang bertarung dalam pilkada. Karena dari para elit politik tersebutlah yang bekerja keras mulai dari menentukan calon walikota dan wakil walikota yang akan diusung dalam pilkada, proses koalisi dengan

---

<sup>10</sup>Syarifuddin Jurdi, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik*, h. 21.

partai lain yang ingin bergabung dalam memenangkan pasangan yang diusung, dan bahkan semua strategi politik dalam berkampanye semuanya dilakukan oleh para elit politik dan para tim pemenangan yang tergabung dalam koalisi.<sup>11</sup>

Pertama mekanisme internal partai dalam menentukan calon. Mekanisme yang dilakukan oleh para elit politik partai yang ingin mengusung calon walikota dan wakil walikota pada pilkada Kota Makassar 2018 mulai dari partai politik adalah dimana para elit politik partai membuka pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota yang akan diusung dalam pilkada Kota Makassar 2018.<sup>12</sup>

Kedua proses terjadinya koalisi antar elit politik partai koalisi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa pasangan calon kepala daerah bisa di dukung dari partai politik, gabungan partai politik dan bisa juga melalui jalur independen.<sup>13</sup>

Adapun ketentuannya yaitu partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang - kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerahnya.<sup>14</sup>

Ketiga strategi kampanye dalam pemenangan pilwakot. Strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh para elit politik dalam pemenangan pasangan yang diusung pada Pilwakot Makassar 2018 meliputi dari program yang ditawarkan kepada masyarakat berupa Visi dan Misi dari pasangan tersebut yang dikelola oleh

---

<sup>11</sup>Erick Horas, *Wawancara Anggota DPRD dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Makassar*, 16 Maret 2018.

<sup>12</sup>Arif Bahagiawan, *Wawancara Seketaris DPC Partai Gerindra Kota Makassar*, 19 Maret 2018.

<sup>13</sup>Arif Bahagiawan, *Wawancara Seketaris DPC Partai Gerindra Kota Makassar*, 19 Maret 2018.

<sup>14</sup>UU NRI No. 32 Tahun 2004 Pasal 59 Ayat 1 dan 2.

para elit politik tersebut. Elit politik yang dimaksud disini adalah elit politik yang tergabung dalam tim pemenangan kandidat pada Pilwakot Makassar 2018. Produk yang ditawarkan oleh para elit politik disini adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusungnya. Dimana para elit politik memasarkan pasangan yang diusungnya kepada masyarakat luas yang ada di Kota Makassar. Para elit politik dan tim pemenangan bekerja keras untuk memasarkan pasangan yang diusung agar masyarakat tertarik terhadap pasangan yang diusung pada Pilwakot Makassar 2018.<sup>15</sup>

Disini juga para elit politik melakukan sosialisasi melalui model informasi, baik itu informasi langsung dan informasi tidak langsung. Sehingga para elit politik dan para tim pemenangan bekerja keras untuk mengenalkan dan memenangkan pasangan diusung pada Pilwakot Makassar 2018.<sup>16</sup>

Secara umum peran elit politik terhadap pilwakot Makassar berperan sebagai pengusung kandidat dan pendukung kandidat yang akan bersaing pada pilwakot Makassar 2018. Elit politik yang berperan sebagai pengusung adalah elit partai politik yang mengusung paslon Munafri Arifuddin dan Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) yaitu partai Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, PKPI, PDIP, Gerindra, PKS, dan PPP. Sedangkan yang berperan sebagai pendukung Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAMI) yaitu partai PKB dan Demokrat.<sup>17</sup>

Meskipun berbeda istilah antara partai pengusung dan partai pendukung tetapi mereka tetap mempunyai satu peran yang sama yaitu melakukan segala upaya dan tindakan untuk mendukung dan memenangkan kandidatnya pada pilwakot

---

<sup>15</sup>Arif Bahagiawan, *Wawancara Seketaris DPC Partai Gerindra Kota Makassar*, 19 Maret 2018.

<sup>16</sup>Arif Bahagiawan, *Wawancara Seketaris DPC Partai Gerindra Kota Makassar*, 19 Maret 2018.

<sup>17</sup>Muh. Rustan Salam, *Wawancara Ketua BAPILU DPC Partai PKB*, 07 Maret 2018.

Makassar 2018. Partai pengusung ialah gabungan partai politik yang mengusung paslon Appi-Cicu untuk maju pada pilwakot Makassar 2018. Gabungan partai politik tersebut merupakan persyaratan pendaftaran pada pilwakot Makassar yang mendaftar melalui jalur partai politik. Partai pendukung ialah partai yang mendukung paslon DIAMI yang telah mendaftar pada pilwakot Makassar 2018 dengan jalur perseorangan.<sup>18</sup>

Ketatanegaraan Islam sering juga disebut fikih siyasah, siyasah syar'iyah, fikih dawlah yang membahas persoalan kenegaraan secara menyeluruh. Siyasah Syar'iyah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki demi kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya. Siyasah Syar'iyah bermakna luas yang menyangkut hukum ketatanegaraan yang bersumber pada syariat.<sup>19</sup>

Dasar pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu atau agama. Nilai dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi – institusi kenegaraan yang berwenang. Syariat merupakan sumber pokok bagi kebijakan pemerintahan dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>20</sup>

Secara formal tidak ada keterangan yang bersifat akademis tentang kapan munculnya partai politik dalam Islam terutama jika merujuk kepada masa kenabian Muhammad saw. Konsepsi Islam tentang partai politik (al-hizb al-Siyasi) berdasarkan istilah – istilah yang digunakan di al-Qur'an maupun as-Sunnah adalah

<sup>18</sup>Muh. Rustan Salam, *Wawancara Ketua BAPILU DPC Partai PKB*, 07 Maret 2018.

<sup>19</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Cet. II; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 7.

<sup>20</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, h. 7.



menggunakan kata *al-hizb* (kelompok, *al-thoifah* (bagian kelompok), *al-qoum* (kelompok berdasarkan ideologi dan teologi agama), istilah ini menunjuk kepada makna “partai” adalah *al-hizb*.<sup>21</sup> Sebagai mana yang tercantum dalam QS. al-Maidah/5 : 56 sebagai berikut :

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya :

Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang.

*Hizb* yang digunakan pada ayat ini bermakna pengikut (agama Allah). Orang – orang yang beriman adalah *hizbullah* (kelompok pengikut agama Allah). *Al-hizb* adalah kelompok, organisasi atau kumpulan orang yang berjuang dan berorientasi dengan syariat Allah dan itulah disebut “partai” dalam Islam.<sup>22</sup>

Berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik ra. Ia berkata Rasulullah saw. Bersabda “akan datang pada kalian kaum - kaum yang hati mereka lebih lembut daripada (hati) kalian. Maka datanglah orang – orang dari kabilah Asy’ari dan diantara mereka ada Abu Musa al-Asy’ari. Tatkala telah dekat kota Madinah, mereka merasa kotor dan berkata “besok kita akan bertemu Sang Kekasih, Muhammad saw. dan *hizbahu* (kelompok/golongan partainya)”<sup>23</sup>

Secara historis-klasik dalam Islam cukup banyak literatur yang menjelaskan tentang adanya kelompok/golongan dan partai yang muncul dan kemudian berkembang, bahkan sejak masa kenabian Muhammad saw., misalnya kemunculan kelompok/partai syiah (Syiat Ali), kelompok/partai khawarij, kelompok/partai

<sup>21</sup>Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam* (Cet. I; Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 156.

<sup>22</sup>Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2014), h. 217.

<sup>23</sup>Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, h. 220.



Murjiah dan kelompok/partai Mu'tazillah. Semua kelompok/partai tersebut menggunakan atribut keagamaan dan ideologi yang dipahami dari interaksi sosial dan politik keagamaan saat itu.<sup>24</sup>

Berdasarkan kaidah fikih tindakan dan kebijakan seorang pemimpin atau penguasa harus berkaitan dengan kemaslahatan.

Fatwa Ulama Fikih, adalah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahnya :

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.<sup>25</sup>

Fatwa Imam Asy-Syafi'i:

الْيَتِيمُ مِنَ الْوَلِيِّ مَنْزِلَةُ الرَّعِيَّةِ مِنَ الْإِمَامِ مَنْزِلَةُ

Terjemahnya :

Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.

Fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib :

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anakyatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri padanya).”<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*, h. 157.

<sup>25</sup>H.A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007, h. 147.

<sup>26</sup>H.A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h. 147.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.<sup>27</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap peran yang dilakukan oleh elit politik atau penguasa politik haruslah bertujuan untuk kemaslahatan rakyatnya.

Perilaku dari elit politik yang menjalankan peran untuk mendukung kandidatnya di pilwakot Makassar 2018. Haruslah tidak terlepas dari norma – norma agama agar proses pilkada dapat berjalan dengan santun, aman dan lancar.<sup>28</sup>

#### **D. *Persepsi Elit Politik Terhadap Pilkada di Kota Makassar***

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005.<sup>29</sup> Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing - masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.<sup>30</sup>

Karena daerah Kota/Kabupaten merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu melalui pemilihan langsung.<sup>31</sup>

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilukada dalam waktu-waktu tertentu. Pemilukada pada hakekatnya merupakan pengakuan dan

---

<sup>27</sup>H.A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h. 147.

<sup>28</sup>Muh. Rustan Salam, *Wawancara Ketua BAPILU DPC Partai PKB*, 07 Maret 2018.

<sup>29</sup>UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>30</sup>UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat 4

<sup>31</sup>Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 53.

perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilukada merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.<sup>32</sup>

Kota Makassar pada tahun 2018 melaksanakan pemilihan calon walikota dan wakil walikota. Proses pelaksanaan pilwakot Makassar dapat dikatakan sempurna karena proses pilwakot tersebut benar – benar menunjukkan ciri negara yang demokrasi. Masyarakat diberikan ruang untuk ikut terlibat selama proses pelaksanaan sampai tiba waktu pemilihan. Semuanya dikembalikan kepada masyarakat untuk bebas memilih siapa yang menjadi walikota dan wakil walikotanya. Segala bentuk pelaksanaan dan pengawasan pada pilwakot Makassar telah diakomodir dengan sangat baik untuk menghindari adanya konflik antar massa pendukung calon kandidat. Bahkan KPU telah membagi zona untuk para massa pendukung calon kandidat pilwakot Makassar.<sup>33</sup>

Elit partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sebagai suatu

---

<sup>32</sup>M. Rusli Karim, *Pemilukada Demokratis Kompetitif* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 2

<sup>33</sup>Muh. Rustan Salam, *Wawancara Ketua BAPILU DPC Partai PKB*, 07 Maret 2018.

organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai.<sup>34</sup>

Hubungan demokrasi yang terjalin antara pemerintah, masyarakat dan elit politik pada proses pilwakot Makassar terbilang baik. Karena proses pilwakot Makassar mampu berjalan dengan damai, tertib dan demokrasi. Pada proses pilwakot Makassar terjadi pertarungan pemilihan dua pasang kandidat yaitu DIAMI dan APPICICU. Proses pemilihan inilah merupakan bukti sistem demokrasi di Kota Makassar berjalan dengan baik. Tidak, seperti yang terjadi di beberapa daerah diluar Makassar yang dimana calon kandidat hanya melawan kotak suara kosong. Adanya kotak suara kosong merupakan bukti bahwa hubungan antara pemerintah, masyarakat dan elit politik tidak berjalan dengan demokrasi di daerah tersebut.<sup>35</sup>

Proses pilwakot Makassar menunjukkan bahwa sistem demokrasi berjalan dengan tertib dan aman. Karena peran partai politik sebagai pilar demokrasi dalam mengakomodir apresiasi kadernya dapat berjalan dengan baik. Buktinya adalah adanya pertarungan antara calon kandidat yang maju lewat jalur parpol melawan calon kandidat yang maju lewat jalur perseorangan.<sup>36</sup>

Berdasarkan teori dan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota di Makassar telah berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Karena telah melibatkan semua aspek masyarakat

---

<sup>34</sup>T. May. Rudy, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2003), h. 87.

<sup>35</sup>Erick Horas, *Wawancara Anggota DPRD dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Makassar*, 16 Maret 2018.

<sup>36</sup>Erick Horas, *Wawancara Anggota DPRD dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Makassar*, 16 Maret 2018.

seperti partai politik, tokoh masyarakat dan rakyat. Dan pelaksanaannya juga telah sesuai prosedur perundang-undangan.

#### **E. *Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Elit Politik di Pilkada Kota Makassar***

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas dan menjadi faktor utamanya ialah adanya hubungan yang kuat di antara anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang-orang diluar kelompoknya.<sup>37</sup>

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh - mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya menjadi unsur yang ada bagi masyarakat. Masyarakat bukanya ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang - orang saja diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.<sup>38</sup>

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Masyarakat juga sering diartikan sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.<sup>39</sup>

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan

---

<sup>37</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 681.

<sup>38</sup>Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), h. 47.

<sup>39</sup>Suparto, *Sosiologi dan Antropologi* (Bandung : Armico, 1987), h. 193.

politik dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.<sup>40</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pilwakot menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah hal baik. Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pilwakot sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.<sup>41</sup>

Peran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sangat strategis, karena menentukan kepemimpinan 5 tahun kedepan, selain menyalurkan hak pilihnya masyarakat juga bisa terlibat aktif dalam mengawasi proses pelaksanaan pilkada. Masyarakat harus terlibat aktif, karena tugas pengawasan pada pilkada ini bukan hanya milik bawaslu atau penyelenggara yang lain, melainkan tanggung jawab bersama, penyelenggaraan pilkada bukan hal yang eksklusif lagi tetapi harus terbuka secara umum dan menjadi milik seluruh elemen masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>M. Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bangsa Rampai)* (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), h. 73.

<sup>41</sup>Herman Baba, *Wawancara Pengamat Hukum Tata Negara*, 21 Maret 2018.

<sup>42</sup>Erick Horas, *Wawancara Anggota DPRD dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Makassar*, 16 Maret 2018

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada sangat dibutuhkan karena masyarakat merupakan bagian terpenting dari sebuah proses pilkada. Pertimbangan rasional dengan menjadi pemilih cerdas dapat terpilihnya pemimpin dan wakil - wakil rakyat yang mempunyai integritas dan kualitas yang tinggi.<sup>43</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sangat penting. Karena peran masyarakatlah yang akan menentukan calon pemimpin yang amanah dan anti korupsi. Pada proses pilkada masyarakat sebaiknya tidak memilih calon kandidat yang melakukan politik uang. Dan masyarakat juga ikut memerangi kampanye hitam berbau SARA, fitnah dan hoax atau minimal dengan tidak menyebarkannya. Sehingga pesta demokrasi di daerah, benar-benar berkualitas. Lebih menonjolkan adu ide dan program. Bukan adu ujaran kebencian, fitnah, hoax, dan politik uang.<sup>44</sup>

Pandangan masyarakat terhadap elit politik tentu berbeda-beda, tidak hanya penilaian masyarakat yang menilai positif, namun juga tentu penilaian masyarakat terhadap elit politik yang menilai negatif. Begitu juga dengan pandangan masyarakat terhadap peran elit politik di Pilwakot Makassar 2018.

#### 1. Persepsi Positif Mengenai Elit Politik

Peran elit politik terhadap pelaksanaan pilwakot Makassar masih terlihat baik, karena elit politik mampu mengakomodir basis massanya untuk berkampanye dengan santun dan baik, tidak saling mencela antara pendukung, tidak mudah terpancing dengan isu – isu yang mampu menimbulkan konflik dan tidak saling menjatuhkan antara pendukung calon.<sup>45</sup> Elit Politik dalam mensosialisasikan kandidatnya tidak melakukan unsur paksaan atau intervensi untuk memilih

---

<sup>43</sup>Rahman Arsyad, *Wawancara Pengamat Politik*, 22 Maret 2018.

<sup>44</sup>Muh. Rustan Salam, *Wawancara Ketua BAPILU DPC Partai PKB*, 07 Maret 2018.

<sup>45</sup>Herman Baba, *Wawancara Pengamat Hukum Tata Negara*, 21 Maret 2018.



kandidatnya. Dan dalam rangka kampanye belum adanya tindakan kampanye hitam seperti membagikan uang, menyebarkan fitnah dan isu SARA.<sup>46</sup>

## 2. Persepsi Negatif Mengenai Elit Politik

Peran elit politik terhadap pelaksanaan pilwakot Makassar telah menunjukkan pandangan yang kurang baik, karena telah adanya upaya politik uang berupa pemberian HP kepada kepala RT/RW. Sehingga terjadinya upaya untuk menjatuhkan pihak kandidat lawan dengan melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang.<sup>47</sup>

Peran yang dimainkan oleh para elit politik yang mengatas namakan kepentingan rakyat hanyalah sekedar kedok untuk memenangkan calon yang didukungnya. Tetapi sebenarnya itu hanya untuk kepentingan partainya karena elit politik mempunyai hubungan timbal balik dengan calon kandidatnya.<sup>48</sup>

Elit politik juga menunjukkan sikap yang kurang baik, karena adanya pernyataan secara terang – terangan perbedaan pilihan antara partai dan kadernya. Seharusnya setiap kader partai harus satu keputusan dan satu perbuatan terhadap pilihan yang didukung partainya dalam pilwakot Makassar.<sup>49</sup>

Berdasarkan teori dan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga mempunyai peranan yang penting dalam proses pilkada sehingga masyarakat juga mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya terhadap peran yang dilakukan oleh elit politik selama proses pelaksanaan pilwakot Makassar. Masyarakat beranggapan bahwa peran elit politik telah sesuai dengan sikap demokrasi yang sebagaimana mestinya dan ada juga yang beranggapan peran elit politik tidak sesuai dengan aturan demokrasi yang sebagaimana mestinya.

<sup>46</sup>Syarif Hidayatullah, Wawancara Ketua PMII Sul-sel, 24 Maret 2018.

<sup>47</sup>Rahman Arsyad, *Wawancara Pengamat Politik*, 22 Maret 2018.

<sup>48</sup>Herman Baba, *Wawancara Pengamat Hukum Tata Negara*, 21 Maret 2018.

<sup>49</sup>Syarif Hidayatullah, *Wawancara Ketua PMII Sul-sel*, 24 Maret 2018.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran elit politik terhadap pilkada di Kota Makassar dan dalam Ketatanegaraan Islam mempunyai perbedaan dan kesamaan. Perbedaannya adalah dalam pilkada di Kota Makassar elit politik mempunyai peran sebagai pemberi informasi mengenai calon pemimpin kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan kampanye. Tahapan ini tidak terdapat dalam ketatanegaraan Islam. Sedangkan persamaannya adalah elit politik melakukan musyawarah untuk menentukan kriteria calon pemimpin dan melakukan koalisi untuk calon yang telah ditetapkan sebagai calon pemimpin. Tahapan ini juga terdapat dalam ketatanegaraan Islam pada masa pemerintahan Rasulullah Saw. dan Khulafaur Rasyidin. Perbedaan lainnya juga ialah pada ketatanegaraan Islam masyarakat melakukan bai'at (janji setia) dihadapan pemimpinnya untuk dipimpin oleh pemimpin yang terpilih. Sedangkan hal tersebut tidak terdapat pada pilkada di kota Makassar.
2. Pilkada di kota Makassar menunjukan bahwa hubungan demokrasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat telah berjalan sebagaimana mestinya. Karena pemerintah, partai politik dan masyarakat telah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan tatanan negaraa demokrasi.

3. Masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda – beda terhadap peran elit politik di pilwakot Makassar. Ada yang beranggapan elit politik belum melakukan kampanye hitam dan ada juga yang beranggapan elit politik telah melakukan kampanye hitam.

## **2. *Implikasi Penelitian***

Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Sebaiknya elit politik lebih memperhatikan kesisi agamanya dalam menentukan calon yang didukungnya. Sehingga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang berlandaskan dengan syariat Islam.
2. Proses pelaksanaan pilkada harus diperhatikan terus - menerus dan ditingkatkan lagi, sehingga proses pelaksanaan pilkada akan terus berjalan secara demokrasi.
3. Elit politik sebaiknya lebih hati-hati dalam menjalankan perannya sehingga masyarakat tidak salah paham mengenai tindakan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhârî. Hadis riwayat, Shahîh al-Bukhârî, No. 6781.
- al-Thabarî. Abû Ja'far, Târikh al-Thabarî, Beirut, Dâr al-Fikr, 1997.
- Arsyad. Rahman, Wawancara Pengamat Politik, 22 Maret 2018.
- Asikin. Zainal dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. II, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Baba. Herman, Wawancara Pengamat Hukum Tata Negara, 21 Maret 2018.
- Bahagiawan. Arif, Wawancara Seketaris DPC Partai Gerindra Kota Makassar, 19 Maret 2018.
- Budiardjo. M., Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bangsa Rampai, Jakarta, PT. Gramedia, 1982.
- Budiardjo. Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Budiman. Hendra, Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu, Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015.
- Cohen. Bruce J., Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Donald. Parulian, Menggugat Pemilukada, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2016.
- Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Hasim. Moch. Nur, dan Sri Yanuarti, Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilukada, dan Sistem Presidensil Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2013.
- Hidayatullah. Syarif, Wawancara Ketua PMII Sul-sel, 24 Maret 2018.
- Horas. Erick, Wawancara Anggota DPRD dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Makassar, 16 Maret 2018.
- Ibrahim. Harmaily, Moh. Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. V, Jakarta Sinar Bakti, 1983.

- Jurdi. Syarifuddin, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2004.
- Karim. M. Rusli, *Pemilukada Demokratis Kompetitif*, Cet. I, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Keller. Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elit*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Klinken. Gerry Van, Henk Schulte Nordholt, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Lijphart. Arend, *Electoral System and Party Systems A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, New York, Oxford UP, 1995.
- Mania. Sitti, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta, PT. Rajawali Press, 2008.
- Muhadjir. Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1998.
- Nasional. Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Neumann. Sigmund, *Modern Political Parties dalam Comparative Politic A Reader*, London The Free Press of Glencoe, 1963.
- Niel. Robert van, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1984.
- Noor. Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Pamungkas. Sigit, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta, Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- Paramarta. Ambeg, dkk, *Peran Elit Politik dan Partai Politik Dalam Mencegah Konflik Di Pilkada*, Jakarta Selatan, Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
- Poerwadarminta. W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Balai Pustaka, 1995.

- Praja. Ganjar Nugraha Jiwa, Pengantar Ilmu Politik, Bandung, Armico, 1981.
- Purwantana. PK., Partai Politik di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Putra. Fadillah, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Raho. Bernard, Teori Sosiologi Modern, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2007.
- Rakhmat. Jalaludin, Psikologi Komunikasi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Rasyid. Hatamar, Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam, Cet. I, Depok, RajaGrafindo Persada, 2017.
- Rosyidi. Imron, Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Rozali. Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta, Rajawali Pers, 2005.
- Rudy. T. May., Pengantar Ilmu Politik Bandung, PT. Rafika Aditama, 2003.
- Salam. Muh. Rustan, Wawancara Ketua BAPILU DPC Partai PKB, 07 Maret 2018.
- Samuddin. Rapung, Fiqih Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, Cet. I, Jakarta Gozian Press, 2013.
- Sanit. Ardi, Partai, Pemilukada, dan Demokrasi, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Setiyanto. Agus, Elite Pribumi Bengkulu, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2001.
- Shadily. Hassan, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1994.
- Sjadzali. Munawir, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta, UI Press, 1993.
- Soekanto. Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986.
- Sukardja. Ahmad, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa, Cet. II, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014.

- Sumarno. A.P., Dimensi - Dimensi Komunikasi Politik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sunggono. Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suparto, Sosiologi dan Antropologi, Bandung, Armico, 1987.
- Surbakti. Ramlan, Memahami Ilmu Politik Jakarta, Gramedia Widya Pustaka Utama, 1992.
- Suryabrata. Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Suwarno, Sejarah Politik Indonesia Modern, Yogyakarta, Ombak, 2012.
- Syamsuddin. M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Cet. I, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tim Viva Justicia, Undang – Undang Pilkada, Yogyakarta, Genesis Learning, 2016
- Tutik. Titik Triwulan, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Cet. I, Jakarta, Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2006.
- UU NRI No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- UU NRI No. 32 Tahun 2004 Pasal 59 Ayat 1 dan 2.
- UU NRI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- UU NRI Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perubahan Atas UU NRI Nomor 2 Tentang Partai Politik
- UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat 2
- UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat 4
- van Deth. Jan W., Kenneth Newton, Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta, Cet. I, Bandung, Nusa Media, 2016.
- Varma. S. P., Teori Politik Moderen, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Wardani. Kunthi Dyah, *Impeachment Dalam ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2007.

Wardiono. Kelik, dan Khudzaifah Dimyati, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, t.p, 2004.

Wulansari. Dewi, *Sosiologi Konsep dan Teori* Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.



### SUMBER INTERNET

<http://makassar.tribunnews.com/2018/01/09/jelang-pendaftaran-appi-cicu-genggam-10-partai-pengusung>

<http://teoripolitik.com/sejarah-partai-politik-di-indonesia/>

<https://berita-sulsel.com/2017/11/15/catat-ini-tahapan-pilwali-makassar-2018/>

<https://news.detik.com/berita/d-3809944/pilwalkot-makassar-duel-independen-vs->





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Wawan Roesandy, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 19 Agustus 1993 dari pasangan Waris Dg. Tompo dan Hasniah Dg. Bollo. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis pertama kali melangkahkan kaki ke dunia pendidikan pada tahun 2000 di SD Inpres Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tamat tahun 2006. Kemudian melanjutkan ke tingkat SMP Negeri 4 Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2009. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMK Negeri 2 Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2012. Kemudian setelah tamat penulis memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai tempat menuntut ilmu melalui jalur UMM pada tahun 2013 dengan mengambil jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Masyarakat**

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap keterlibatan masyarakat di pilkada kota makassar ?
2. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap perkembangan politik dalam pilkada kota makassar ?
3. Apa harapan bapak/ibu terhadap kaum elit politik yang memiliki peran terhadap pelaksanaan pilkada di kota Makassar ?
4. Bagaimana persepsi bapak/ibu terhadap kinerja elit politik dalam proses pelaksanaan pilkada ?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap peran elit politik di pilkada kota makassar ?

### **Elit Politik**

1. Bagaimana menurut bapak/ibu siapa saja elit politik yang mempunyai peran dalam pilkada di kota Makassar ?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu keterlibatan elit politik dalam proses pelaksanaan pilkada di kota Makassar ?
3. Menurut bapak/ibu apa yang harus di benahi dalam proses pelaksanaan pilkada di kota Makassar ?
4. Bagaimana persepsi bapak/ibu terhadap proses pelaksanaan pilkada di kota Makassar ?
5. Menurut bapak/ibu dari segimana saja yang merupakan sumbangsi peran elit politik di pilkada Kota Makassar ?
6. Apa batasan dalam pilkada yang tidak bisa diinterfensi oleh kaum elit politik ?

## FOTO- FOTO WAWANCARA

Foto bersama bapak Erick Horas, selaku Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar dan Ketua DPC Partai Gerindra Makassar.



Foto bersama bapak M. Rustan Salam, selaku Wakil Ketua II dan Ketua Bapil DPC Partai PKB Makassar.



Foto bersama Bapak Arif Bahagiawan, selaku Sekertaris DPC Partai Gerindra  
Makassar.





Foto bersama bapak Herman Baba, selaku pengamat Hukum Tata Negara.



Foto bersama bapak Muhammad Arsyad, selaku pengamat Politik di Kota Makassar.

